



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIC INDONESIA**

**RAPAT KERJA KOMISI II DPR RI
DENGAN
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

-
- Tahun Sidang** : 2022-2023
- Masa Persidangan** : II
- Rapat ke-** : --
- Jenis Rapat** : Rapat Kerja
- Sifat Rapat** : Terbuka
- Hari & Tanggal
Rapat** : Senin, 21 November 2022
- Waktu Rapat** : 13.00 WIB s.d. 17.55 WIB
- Tempat Rapat** : Ruang Rapat Komisi II DPR RI / KK.III
Gedung Nusantara
- Ketua Rapat** : Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si., M.T.
(F-P. GOLKAR/Ketua Komisi II DPR RI)
- Acara Rapat** : Tindak Lanjut Isu-isu Aktual Terakit Pertanahan
- Sekretaris Rapat** : Mahmud, S.E.
(Kabag Set. Komisi II DPR RI)
- Hadir** : 38 dari 47 orang Anggota dengan rincian:
- A. Anggota DPR RI:**
PIMPINAN:
1. Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si., M.T.
(Ketua/F-Golkar)
 2. Dr. Junimart Girsang, S.H., M.B.A., M.H.
(Wakil Ketua/F-PDIP)
 3. H. Yanuar Prihatin, M.Si.
(Wakil Ketua/F-PKB)
 4. Dr. H. Syamsurizal, S.E., M.M.
(Wakil Ketua/F-PPP)

**1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN:**

10 orang Anggota dari 11 Anggota:

1. Arif Wibowo
2. Komarudin Watubun, S.H., M.H.
3. Ir. H. Endro Suswanto Yahman, M.Sc.
4. IGN Kesuma Kelakan, S.T., M.Si.
5. I Nyoman Parta, S.H.
6. Drs. Cornelis, M.H.
7. I Ketut Kariyasa Adnyana, S.P.
8. H. Yadi Srimulyadi
9. H. M. Rifqinizami Karsayuda, S.H., M.H.
10. Hj. Aida Muslimah

2. FRAKSI PARTAI GOLKAR:

6 orang Anggota dari 7 Anggota:

1. Agung Widyantoro, S.H., M.Si.
2. Ir. H. Arsyadjuliandi Rachman, MBA.
3. Dra. Hj. Haeny Relawati R.W., M.Si.
4. A.A. Bagus Adhi Mahendra Putra, M.H.,
M.Kn.
5. H. Dito Ganinduto, M.B.A.
6. Drs. H. Riswan Tony DK

3. FRAKSI PARTAI GERINDRA:

5 orang Anggota dari 7 Anggota:

1. Drs. Difriadi
2. Andika Pandu Puragabaya, S.Psi., M.Si.
3. H. Rahmat Muhajirin, S.H.
4. Prasetyo Hadi
5. Ir. Irwan Ardi Hasman

4. FRAKSI NASDEM:

1 orang Anggota dari 2 Anggota:

1. Aminurokhman, S.E., M.M.

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

2 orang Anggota dari 2 Anggota:

1. Drs. Mohammad Toha, S.Sos., M.Si.
2. H. Sukanto, S.H.

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

4 orang Anggota dari 5 Anggota:

1. H. Wahyu Sanjaya, S.E., M.M.
2. H. Zulkifli Anwar
3. Rezka Oktoberia
4. Ir. Ongku P. Hasibuan, M.M.

7. FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera:

3 orang Anggota dari 4 Anggota:

1. Drs. H. Chairul Anwar, Apt.
2. Teddy Setiadi, S.I.Kom.
3. KH. Aus Hidayat Nur

8. FRAKSI PARTAI Amanat Nasional:

3 orang Anggota dari 3 Anggota:

1. Drs. H. Guspari Gaus, M.Si.
2. Paulus Ubruangge
3. Dian Istiqomah

**9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN
Pembangunan:**

0 orang Anggota dari 1 Anggota:

ANGGOTA YANG IZIN DAN SAKIT:

B. LEMBAGA NEGARA:

**Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Kepala BPN RI:**

1. Menteri ATR BPN RI (Marsekal TNI (Purn)
DR. (HC) Hadi Tjahjanto, S.I.P.):
2. Pjt. Dj. PA (Andi Tenrisan)
3. Dj. PPTR (Budi Situmorang)
4. Karo Humas (Yulia Jaya N)
5. Sesditjen PHPT (F. Vivi Gaggar)
6. Sesditjen JPPR (Fitriyani Hasibuan)
7. Sesitjen (Sri Puspita Dewi)
8. Karo Renks (Dony Emwan)
9. Sesditjen Taru (Farid Hidayat)
10. Kapus Datin (Ketut Agung S)
11. Dir Perkara (Ilyas Tejo P)
12. Sesditjen PSKP (Hasan Basri)
13. Dir. BPPT (M. Unu Ibunudin)
14. Dir. PPKP (Widodo)
15. Sesditjen PTPP (Deni Ahmad Hidayat)
16. Sesditjen Peta (Awaludin)
17. Biro Keuangan dan BMN (lin Herawati)
18. Biro Keuangan dan BMN (Arof Fatimah
W.W.)
19. Sesditjen PPTR (Shafik Ananta)
20. Karo Hukum (Joko Subagyo)

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Kita mulai ya.

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang,
Salam sejahtera buat kita semua.

Yang terhormat Saudara Menteri ATR, Kepala BPN beserta seluruh jajaran, Kemudian yang terhormat seluruh Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI baik, yang hadir secara fisik maupun yang hadir secara virtual,

Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kita pada hari ini masih bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita terutama kami melaksanakan tugas secara konstitusional di bidang pengawasan.

Seperti biasanya rapat-rapat di DPR masih dilaksanakan secara *hybrid*, ada yang hadir secara fisik, ada juga yang hadir secara *virtual* dan ini otomatis memudahkan kita dan saya cuman bisa menyatakan bahwa forum ini sudah memenuhi kourum dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPR RI. Oleh karena itu perkenankanlah saya untuk membuka rapat ini dan rapat ini terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 13.00 WIB)

Selanjutnya tentu kami ucapkan terima kasih kepada Saudara Menteri ATR yang berkenan hadir memenuhi undangan kami pada hari ini serta Pak Wamen, Pak Sekjen kemudian para Dirjen yang lain, kemudian terima kasih juga kepada seluruh Pimpinan dan Anggota DPR RI yang hadir baik secara fisik maupun *virtual*.

Bapak/Ibu sekalian,

Saya ingin menawarkan sekaligus meminta persetujuan kepada kita semua tentang agenda rapat kita pada hari ini, tentu rapat kita hari ini menindaklanjuti isu-isu actual, terkait dengan pertanahan yang tentu dalam rapat kerja sebelumnya sudah kita pernah bahas, dan apa namanya dan seperti kita ketahui bahwa isu pertanahan ini tidak atau belum selesai-selesai. Selama kata orang selama masih ada bumi, selama manusia tinggalnya di darat, masalah pertanahan ini tidak atau belum selesai-selesai, kecuali kalau pindah tinggalnya di langit katanya begitu.

Dan sekaligus juga saya minta persetujuan rapat kita paling lama 16.30, nanti kalau ini kita perpanjang lagi, baik.

(RAPAT: SETUJU)

Saya kira langsung saja, supaya biar cepat dan efektif, kami persilakan saudara Menteri untuk menyampaikan penjelasan.

MENTERI ATR BPN REPUBLIK INDONESIA (MARSEKAL TNI (PURN) DR. (HC) HADI TJAHAJANTO, S.I.P.):

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Yang terhormat Ketua,
Wakil Ketua dan para Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kita dapat hadir dan mengikuti acara rapat kerja hari ini. Dan semoga Allah SWT meridhoi rapat kerja kita yang kita lakukan pada hari ini dan membimbing kita dalam menjalankan tugas serta meningkatkan kesabaran dan keikhlasan kita dalam menjalankan amanah yang kita emban.

Semoga kita selalu diberikan kesehatan tetap fokus dan semangat dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2022.

Terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada yang terhormat Ketua, Wakil Ketua serta para Anggota Komisi II DPR RI atas kesempatan yang diberikan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional untuk melakukan rapat kerja ini.

Dan izinkan kami melaporkan bahwa rapat kerja kali ini, kami menghadirkan seluruh pejabat Bapak Wamen, Bapak Sekjen, Dirjen, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pusat seluruh Kantor Wilayah BPN baik melalui luring maupun daring.

Sesuai dengan surat undangan dari Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Korpolkam No.B/19324/BW.01/11 Tahun 2022 tanggal 11 November 2022. Hal undangan rapat kerja yang kami terima adalah agenda rapat kerja untuk tindak lanjut isu-isu aktual terkait pertanahan dan izinkan kami pada kesempatan ini juga melaporkan *progress* kinerja bidang pertanahan dan tata ruang.

Yang terhormat Ketua, Wakil Ketua, dan
Para Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,

Izinkan kami menyampaikan capaian kinerja berupa laporan realisasi pelaksanaan anggaran dan fisik tahun 2022. Berdasarkan DIPA Tahun 2022 alokasi anggaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional sebesar Rp7.858.579.363.000,00 berdasarkan alokasi anggaran Tahun 2022 tersebut capaian program dan anggaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional telah, setelah perubahan anggaran

per tanggal 15 November 2022 adalah sebesar Rp5.510.435.849.124,00 atau sebesar 70,12% dan capaian realisasi anggaran per program, per sumber dana telah kami sajikan pada tabel 1 dan sudah terbaca di layar per sumber dana, per program, kemudian penerimaan negara bukan pajak PNBP dan termasuk didalamnya adalah hibah dalam negeri atau HDN.

Kemudian kami laporkan dalam hal realisasi fisik, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional sampai dengan 15 November 2022 telah merealisasikan program dan kegiatan yang merupakan prioritas nasional adapun program dan kegiatan tersebut dapat kami sajikan dalam tampilan di layar kita lihat bahwa program kegiatan ada 13 kemudian target dan realisasi sesuai dengan apa yang ada di gambar.

Nomor satu dokumen persetujuan substansi RDTR kabupaten/kota target 176 dan realisasi 73 sampai tercapai 41,48%. Peta dasar pertanahan target 2.259 dan realisasi 1.560 realisasi 69,05% termasuk peta tematik pertanahan dan ruang target dan realisasi baru tercapai 76,13. Peta bidang tanah PTSL target 5 juta 35, 130 realisasi 3.890,423, realisasi 77,27%.

Memang dari semua program kegiatan ini yang masih, yang sudah di atas hampir 100% hanya pada data pengendalian HGU habis tanah tidak termanfaatkan dan pelepasan sebagian. Kalau kita lihat memang targetnya hanya 18.217 sehingga bisa 100% dan ini mungkin akan kita tambah lagi karena kalau cuma segini 100% juga bisa.

Yang terhormat Ketua, Wakil Ketua, dan
Para Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang
saya hormati,

Terkait realisasi pendaftaran tanah dapat kami jelaskan kondisi umum sebagai berikut: Negara kesatuan Republik Indonesia memiliki luas wilayah 823 juta hektar dengan luas daratan 191,94 juta hektar dan luas perairan mencapai 632 juta hektar. Dari luas daratan tersebut luas areal pengunungan lain 67,5 juta hektar dengan jumlah bidang tanah sebagai target pendaftaran tanah sebanyak 126 juta bidang.

Hingga Tahun 2021 Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional telah mendaftarkan 94,2 juta bidang tanah, 74,8% dan secara nasional dan 79,4 juta bidang tanah, 63% diantaranya telah bersertifikat dan rata-rata capaian *out put* pendaftaran tanah 5 tahun terakhir mulai Tahun 2017 sampai dengan 2021 sebesar 8.879.961 bidang per tahun dengan rata sertifikat hak atas tanah SHT sebesar 6.398,37 bidang per tahun.

Dengan rincian bahwa capaian 5 tahun terakhir Tahun 2017, 5 juta lebih. Kemudian 2018, 9 juta lebih. 2019, 11 juta lebih. Dan tahun 2020 karena ada Covid turun menjadi 20 juta lebih, 2021 kembali menjadi 12 juta lebih. Sedangkan sertifikat K1 2017 sampai 2021 melalui berbagai program ada 12 program, total adalah 26.941.155.

Yang terhormat Ketua, Wakil Ketua, dan
Para Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,

Izinkan kami melaporkan pelaksanaan reforma agraria khususnya terkait penataan aset pada tanah obyek reforma agraria atau Totoro melalui legalisasi aset maupun redistribusi tanah.

Target pelaksanaan reforma agraria adalah seluas 9 juta hektar. Dengan skema legalisasi aset seluas 4 koma juta hektar meliputi legalisasi terhadap tanah-tanah transmigrasi yang belum bersertifikat yaitu seluas 0,6 juta hektar. Dan legalisasi terhadap tanah-tanah yang sudah berada dalam penguasaan masyarakat seluas 3,9 juta hektar. Dan redistribusi tanah seluas 4,5 juta hektar meliputi hak guna usaha habis, tanah terlantar dan tanah negara lainnya seluas 0,4 juta hektar dan tanah-tanah yang berasal dari kawasan hutan seluas 4,1 juta hektar.

Adapun proses pelaksanaan reforma agraria sebagaimana ilustrasi berikut, legalisasi aset 4,4 setengah juta hektar terdiri dari tanah transmigrasi. Ini yang memang persentasenya masih terlalu kecil, targetnya 0,6 juta hektar, capaiannya baru 126.945 hektar, 21,15%.

Kami terus melaksanakan koordinasi dengan Kementerian Desa dan Transmigrasi untuk meminta lokasi mana saja yang menjadi perhatian sehingga kita bisa melaksanakan sertifikat atau melaksanakan balik nama seperti yang kita laksanakan di Banjarmasin.

Di Banjarmasin di Tanah Laut ada 2.000 sertifikat yang ditinggal pemilikannya. Dan kita berupaya, bekerjasama dengan pemerintah daerah, bisa merealisasikan 82 sudah berhasil karena sertifikat itu sudah sertifikat *landing* sehingga kita perlu koordinasi dengan pengadilan untuk minta putusan supaya tanah itu bisa dialih hakkan. Sedangkan yang sertifikat belum *landing* ini memang perlu pembatalan oleh Kakanta dan akan kita lakukan proses selanjutnya.

Untuk pendaftaran tanah PTSL pensertifikatan tanah masyarakat secara sistematis, target 3,9 juta hektar capaiannya 170,69% sebanyak 7,68 juta hektar dari 3,9. Sedangkan untuk redistribusi tanah 4,5 juta hektar. Untuk eks HGU, eks HGU kami laporkan targetnya 0,4 juta hektar tetapi capaiannya sudah mencapai 296,71 hektar dalam persen jadi luasnya 1,186 juta 850,92 hektar. Ini yang kita lihat melebihi dari target karena banyak HGU-HGU yang habis yang bisa kita redistribusikan.

Untuk pelepasan kawasan hutan memang kami mendapatkan target 4,1 juta hektar yang sudah menjadi APL itu baru 1.623.163 sedangkan capaian sedikit sekali, baru mencapai 333.133 atau 8,13 hektar. Permasalahannya adalah tanah-tanah APL itu juga yang pertama adalah jauh dari penduduk, tidak ada akses bahkan kita juga belum tahu posisinya ada di mana, sehingga kita perlu tim terpadu, tim gabungan untuk mencari letak dari pelepasan hutan tersebut. Kita terus berkoordinasi dengan Kementerian KLHK.

Kami laporkan dari target transmigrasi kami juga akan melaksanakan MoU dengan Kementerian Desa dan Transmigrasi untuk mempercepat permasalahan-permasalahan tanah transmigrasi yang sampai sekarang juga masih prosentasenya sangat dikit sekali dan itu semua harapan masyarakat supaya mendapatkan kepastian hukum atas tanah-tanah transmigrasi yang telah ditinggalkan pemiliknya dan sertifikatnya dipegang oleh penduduk yang ada di tempat tersebut.

Kami laporkan selanjutnya adalah *progress* transformasi digital. Dapat kami jelaskan beberapa capaian bahwa Kementerian ATR/BPN melaksanakan peningkatan kualitas data dalam rangka meningkatkan pelayanan melalui layanan pertanahan elektronik. Prosentase data siap elektronik sebesar 57,17 %.

Selain meningkatkan kualitas data Kementerian ATR/BPN juga melaksanakan digitalisasi dokumen pertanahan dengan melakukan alih media dokumen analog menjadi format digital. Dari 180 juta bendel warna yang sudah dilakukan digitalisasi sebesar 24 juta atau 13,35%.

Kementerian ATR/BPN telah mengimplementasikan empat layanan pertanahan elektronik yaitu layanan pengecekan SKPT, informasi zona nilai tanah dan hak tabungan elektronik e-tell. Prosentase layanan elektronik selalu meningkat setiap tahunnya, empat layanan tersebut setara dengan 70,19 %, total layanan pertanahan pada Tahun 2022 dan masih akan bertambah hingga akhir tahun.

Dari beberapa layanan elektronik jumlah *output* layanan pengecekan elektronik Bulan Juli 2022 sudah jauh melampaui jumlah layanan, hak tanggungan dan jual beli.

Memang arah kami adalah kita bisa memiliki satu sistem *blokchain* ya, namun saat ini kita sedang membangun ekosistemnya, yaitu kita siapkan peta pendaftaran bidang tanah secara digital, kemudian sertifikat juga secara digital, buku tanah juga secara digital dan kita juga paralel dengan membangun digital *skills* terhadap SDM dan juga mencari digital literasi. Sedangkan 50% layanan kita sebenarnya sudah menggunakan layanan elektronik.

Yang terhormat Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang saya hormati,

Izinkan kami melaporkan *progress* penyiapan Rencana Detail Tata Ruang RDTR dalam mendukung pembangunan Ibukota Nusantara sebagai berikut.

Sampai dengan saat ini telah diselesaikan materi teknik dan rencana peraturan Kepala Otorita Ibukota Nusantara tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) wilayah perencanaan WP 1 kawasan inti pusat pemerintahan dan wilayah perencanaan WP 2 Ibukota Negara Barat, Negara Bagian Barat, wilayah perencanaan WP 4 Ibukota Negara Wilayah Timur Satu, wilayah perencanaan WP 5 Ibukota Negara Timur II dan dilanjutkan ke proses legislasi.

Penyusunan RDTR wilayah perencanaan WP VI Ibukota Negara Bagian Utara sampai saat ini masih dalam proses penyelesaian materi teknik. Penyusunan RDTR wilayah perencanaan WP III Ibukota negara Bagian Selatan WP VII. Simpang Samboja WP VIII Koala Samboja dan WP IX Muara Jawa sedang dalam proses penyusunan materi teknik pada Bulan Oktober-Desember 2022. Kami laporkan Sembilan WP, lima sudah selesai, sudah kita serahkan kepada Kepala Otorita, lima lagi menyusul akhir tahun 2022 ini sudah selesai dan akan kita segera kita selesaikan kepada kepala otorita.

Yang terhormat Ketua, Wakil Ketua, dan
Para Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,

Dalam hal penanganan kasus pertanahan, sampai dengan saat ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional telah menangani kasus-kasus pertanahan yang menjadi perhatian masyarakat. Antara lain penyelesaian kasus melalui redistribusi tanah untuk 3.000 orang mantan Komandan GAM, sebagai tindak lanjut MoU Helsinki, sekarang berproses dan *insyaallah* akhir tahun atau awal tahun 2023 sudah bisa kita realisasikan.

Yang kedua penyelesaian kasus redistribusi tanah tahun 2020 terhadap tanah eks HGU No.1 Neglasari dan eks HGU No.3 Cikopomaya di Kecamatan Jasingan Kabupaten Bogor.

Yang ketiga adalah penanganan permasalahan antara masyarakat suku Anak Dalam (SAD) kelompok Sasuatutiga dengan PT. Berkat Sawit Utama, PT. BSU di Provinsi Jambi, *Alhamdulillah* sudah mendekati selesai.

Tuntutan untuk dilakukan sertifikasi hak atas tanah oleh masyarakat Kelurahan Sariredjo terhadap tanah seluas kurang lebih 290 hektar di Kelurahan Sariredjo yang merupakan bagian dari aset tanah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara Lanud Medan seluas 591,3 hektar terletak di Kecamatan Medan Polonia Kota Medan terus berproses.

Dan kelima konflik lahan HGU Simalingka dan Simenciring antara PTPN II selaku pemilik HGU dengan warga masyarakat desa Simalingka dan Desa Simenciring yang menggarap tanah di atas lahan HGU terus kita kawal. Kemarin kami juga telah melakukan pertemuan dengan seluruh institusi yang bertanggungjawab terhadap realisasinya, petani Simalingka dan petani Simenciring.

Yang keenam adalah percepatan penyelesaian konflik agraria terhadap tanah negara bekas HGU no.3 sampai dengan No. 13 Sikasur atas nama PT. Kencana Sikasur terletak di Desa Sikasur, Kecamatan Pelik, Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah, ini juga sudah berproses tinggal diserahkan sertifikatnya secara komunal.

Dan ada juga yang belum tertulis di sini adalah penyelesaian kasus tanah di Blora di mana tanah tersebut adalah milik HPL milik Pemerintah Kabupaten Blora yang terus kita laksanakan kajian, supaya mereka bisa

memiliki tanah, yaitu HGB diatas HPL. Apabila proses di Blora ini selesai, maka permasalahan-permasalahan tanah di seluruh Indonesia yang masyarakatnya secara definitif sudah menjadi desa namun mereka tidak memiliki kepastian hukum karena tanahnya adalah tanah milik pemerintah daerah itu bisa diselesaikan semua. Termasuk juga kami juga sudah koordinasi dengan PTPN, tanah-tanah PTPN yang sudah definitif menjadi desa itu juga bisa kita selesaikan.

Yang terhormat Ketua, Wakil Ketua, dan
Para Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,

Demikian hal-hal yang dapat kami sampaikan dalam acara rapat kerja hari ini, mohon kiranya dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2022 senantiasa mendapatkan dukungan dan pendampingan dari yang terhormat Bapak Pimpinan dan para Anggota Komisi II DPR RI, sehingga apa yang telah diprogramkan dapat dilaksanakan dengan baik. Atas segala upaya dan dukungan yang diberikan oleh yang terhormat Pimpinan dan segenap Anggota Komisi II DPR RI kami mengucapkan terima kasih.

*Wabilahitaufik wal hidayah,
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Terima kasih Saudara Menteri ATR Kepala BPN.

Selanjutnya kita akan masuki sesi pendalaman, kami persilakan Pak Junimart, Pak Syamsul, Pak Gaus, Pak Cornelis, iya tenang-tenang, Pak Rahmat, Pak Riswan, kemudian Ibu Dian, Pak Endro, Pak Rifky, Pak Ongku, Pak Defriadi, iya.

Silakan Pak Junimart.

F-PDIP (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Iya terima kasih Pak Ketua.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera kepada kita semua,
Sehat-sehat Kementerian ATR BPN,

Saya langsung saja Pak Menteri, ini baru pertama ketemu dengan saya khususnya di meja Pimpinan dari Komisi II ini. Ada lima point yang mungkin bisa kita memberikan masukan, sekaligus mengkritisi tentang kerja-kerja dari ATR BPN.

Yang pertama itu menyangkut kasus, iya. BPN ini menjadi bulan-bulanan rakyat, contoh misalnya ketika menyangkut HGU ya, yang tidak sesuai dengan peruntukkan keluasan, contoh di PTPN IV, PTPN III, misalnya mereka mendapat HGU sebanyak 100 hektar tetapi mereka ya, mengokupasi,

memperluas menjadi 120 hektar, akhirnya masyarakat menjadi dirugikan. Kasus ini terjadi di mana-mana saudara Menteri. Dan rakyat selalu menuntut Kementerian ATR BPN padahal ini adalah perilaku-perilaku dari para penerima HGU. Masyarakat hanya meminta supaya ATR BPN melakukan pengukuran ulang. Kami paham untuk mengukur ulang itu perlu anggaran, tetapi mau tidak mau ATR BPN harus turun menengahi ini Pak Menteri sesuai amanat Pak Presiden yang saya tahu ya.

Contoh di Jambi ya sekarang itu 147 KK sampai sekarang Pak Wamen saya khawatir akan terjadi konflik dan pertumpahan darah di sana, iya masyarakat mengklaim mereka memiliki tanah 200 hektar, tetapi PTPN mengklaim itu tanah milik PTPN setengah HGU. *Nah* ketika saya sudah turun kesana saya minta untuk diukur ulang PTPN tidak mau Pak, tidak mau. Alasan mereka ya silakan diukur ulang, kalau memang harus diukur ulang tetapi anggaran kami tidak punya.

Nah, saya dengan Pak Bupati sudah ke lokasi juga Pak, yang lebih arogan ya pihak PTPN itu mengerahkan orang-orang tidak dikenal, Pak Menteri lebih paham karena pemimpin di garis komando ya untuk merusak semua tanaman masyarakat di sana Pak. Di Bajambi Kabupaten Sumalungun, ini nanti ada hubungannya dengan KSP Pak Menteri, saya kadang-kadang bingung Pak, walaupun KSP itu menjadi mitra di Komisi II tetapi kok KSP ngurusin tanah Pak, apakah mereka koordinasi dengan koordinasi-koordinasi dengan ATR BPN? Iya kalau ada solusi yang solutif Pak yang saya lihat dan tangkap itu mereka *enggak* datang, ketemu suruh berhenti sebentar, pulang tetapi mereka *ruler* lagi Pak dari pihak PTPN-nya untuk membumihaguskan tanaman-tanaman dari masyarakat. Ini Pak Menteri mungkin belum tahu, tetapi ini fakta di lapangan dan saya yakin semangat Pak Menteri ini semangat betul-betul untuk mereformasi, betul-betul untuk apa namanya? Menyelamatkan rakyat, tanah itu untuk rakyat Pak dan masyarakat punya dasar menduduki tanah tersebut dari surat Bupati. Ini Pak Menteri di Bajambi, bila perlu kita sama-sama kesana Pak, ke Bajambe sana, kasihan masyarakatnya, itu contoh pertama.

Yang kedua, di Batubara Pak, saya punya suratnya, tembusan ke saya dan surat ini sudah sampai ke Pak Menteri tentang HGU juga, ini terjadi di Kabupaten Batubara, di Sumatera Utara Pak, belum di daerah-daerah lain, belum di Sulawesi Selatan, belum di Kalimantan Barat. Jadi hampir seluruh Indonesia Pak, selalu berbicara tentang HGU, yang notabene HGU itu menjadi kewenangan dari kementerian untuk menerbitkan, tetapi masalahnya masyarakat tidak mau tahu, tidak mau tahu, tahunya BPN. Jadi mereka selalu menuntut BPN ini Pak, iya kan. Sumber pemicu itu ya tentu PTPN-nya Pak, mereka punya 100, inikan fakta Pak di lapangan 100 mereka tidak 100 Pak, menghindari pajak, mereka pergunakan 50 hektar tetapi mereka ekspansi keluar Pak, bahkan lebih luas, mereka ambil di luar itulah tanah masyarakat Pak Menteri dan ini menjadi fakta.

Nah, kalau itu diukur ulang saya yakin bahwa memang mereka betul-betul mengambil tanah rakyat, ini perlu Pak Menteri, supaya Pak Menteri juga bisa turun ke lapangan Pak. Hampir di seluruh Indonesia begitu Pak.

Belum lagi perusahaan swasta yang mendapat HGU seperti di Riau, saya hari Rabu ini memimpin Kunker ke Riau Pak dan saya akan bawa banyak data kesana tentang laporan masyarakat menyangkut HGU. Ini Pak Menteri yang pertama.

Yang kedua, Pak Jokowi tentu kita sepakat selalu bicara kepastian hukum pertanahan, ya selalu berbicara PTSL ya, PTSL tetapi diantara kementerian yang kami lihat dan ini sudah pernah kami diskusikan di Komisi II ya, ternyata kepastian hukum itu bisa, kepastian hukum yang di bawah, yang dilindungi atau berdasarkan undang-undang itu bisa dikalahkan oleh Permen Pak.

Maksudnya ketika tanah sudah bersertifikat, 20 tahun bahkan sertifikatnya, itu bisa tiba-tiba tanahnya sebagian besar menjadi kawasan hutan Pak. *Nah* ini bagaimana komunikasi antara Kementerian ATR BPN dengan Kementerian KLHK Pak. Ini tolong dibangun Pak karena kita sudah sepakat juga dengan Komisi IV untuk melakukan rapat gabungan. Kecuali kalau Pak Menteri mengatakan bahwa sudah ada komunikasi ya supaya tidak tumpang tindih, kasihan masyarakat Pak.

Ya, tiba-tiba mereka sudah menetapkan patok kawasan hutan padahal itu sertifikat, sementara Pak Jokowi mengatakan sertifikat adalah dokumen tertinggi dan paling istimewa, bisa mensejahterakan masyarakat, bisa minta pinjaman ke bank. *Nah* dengan adanya kawasan hutan bank tidak mau terima Pak. Ini sudah kejadian Pak Menteri, *nah* ini tantangan ke Pak Menteri dan para Dirjen. Kalau para Dirjen kan tergantung perintah Pak Menteri sebenarnya, ini perlu Pak Menteri.

Saya, kami apresiasi Pak Menteri yang selalu turun ke bawah menyelesaikan sengketa tanah di Medan Pak. Tetapi banyak surat-surat ke kementerian Pak tidak di respon, belum di responlah kalau istilah orang Jawa. Nanti saya sampaikan Pak, suratnya di sini, yang dari Batubara itu sudah di RDP-kan di apa namanya DPRD Tingkat I, Tingkat II sudah berdasarkan kementerian tetapi belum mendapat tanggapan mengenai ini Pak Menteri.

Nah yang ketiga Pak Menteri tentang mafia pertanahan tentu kalau kita bicara mafia Pak iya, bagaimana solusinya yang solutif, mafia itu menurut saya ada tiga Pak dan ini sudah sering saya sampaikan, termasuk pada iya kementerian sebelumnya Pak Sofyan Djalil.

Pertama oknum internal ATR BPN itu sendiri, oknum Pak, yang kedua adalah APH, yang ketiga peradilan Pak, ini yang paling perlu Pak Menteri. Jadi Pak Menteri *enggak* usah capek-capek Pak mencari mafianya Pak, tidak perlu mencari cukongnya Pak, ini bisa Pak Menteri dan kawan-kawan selesaikan, selesai ini barang Pak.

Contoh saya kasih Pak, contoh misalnya tentang APH. Saran kami supaya Pak Menteri membangun koordinasi komunikasi dengan para APH, Kepolisian, Kejaksaan Pak, ya kan? Apa sarannya Pak, supaya ditempatkan orang-orang BPN disana sebagai bagian dari penyidik, yang paham tentang pertanahan Pak. Mohon maaf APH ini Pak lebih banyak tidak paham

pertanahan tetapi memeriksa masalah pertanahan Pak, nah ini jadi bumerang semua.

Yang kedua bisa dibentuk satu tim, tim penyidik dengan di *back up* dari teman-teman ATR BPN untuk menyelesaikan kasus-kasus pertanahan di tingkat APH, dibentuk satu badan Pak, tetap mereka sebagai *leader* di sana tetapi dari ATR BPN sebagai fungsi evaluatif, fungsi narasumber Pak, ini sangat penting ya. Jadi, mafia itu sebenarnya ada di sana Pak, bisa Bapak cek selalu penyidiknya itu saja, penyidiknya itu-itu saja, pasti dia penyidiknya Pak, di sanakan ada unit Bangtuh iyakan, bangunan dan pertanahan, itu saja dan mereka kurang paham.

Saya sudah pernah sampaikan ke petinggi POLRI ini Pak, iya kan. Mereka *enggak* paham tetapi disuruh meriksa tanah Pak. Bahkan ahli pertanahan Pak, mohon maaf saya sudah sampaikan kepada apa namanya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang duduk di ATR BPN, mestinya saksi hal itu Pak iya. Saya bukan tidak setuju, saya kurang setuju kalau murni dipakai dari akademisi Pak, pakailah orang-orang BPN.

Jadi, mustinya di BPN itu ada satu badan yang khusus bila diminta punya ahli Pak, yang mereka ahli di bidang pertanahan Pak. Karena kan kalau dia orang BPN, ATR BPN dia *enggak* usah pegang Pak, dia hanya lihat warkah dia tahu palsu atau *enggak* itu warkah Pak, iya kan. Tanah ada tiga, dia tahu mana tanah yang benar, mana yang *enggak* dari cara penciuman dia tahu Pak, ini saya serius Pak.

Jadi, mari kita manfaatkan ya sumber daya, sumber daya di ATR BPN ini SDM nya, ini yang benar Pak, ini yang paling benar, jadi kita *enggak* perlu merekrut dari yang luar, masuk BPN *enggak* perlu, didaya fungsikan saja, didayagunakan saja Pak. Kalau Pak Menteri mau cerlang cemerlang di dalam memimpin ATR BPN ini Pak. Kecuali dia ahli bersaksi Pak. Kan berbeda Pak saksi ahli dengan ahli bersaksi, kalau ahli bersaksi tergantung *how much* dan *mau lu* apa, begitu Pak.

Nah ini perlu Pak menjadi masukkan ke Kementerian ATR BPN. Kita-kita mau menguatkan Pak ATR BPN ini, supaya betul-betul dahsyat dan luar biasa, supaya betul-betul apa namanya mimpi dari Pak Jokowi itu bisa terwujud di bawah kepemimpinan Pak Hadi ini Pak. Sangat perlu ini Pak, benahi APH-nya disana, caranya masukkan orang-orang BPN di sana iya kan, mereka hanya fungsi *back up* di sana, hanya fungsi narasumber, ini menjadi fakta Pak.

Coba Bapak perhatikan teman-teman perhatikan di Kepolisian Pak, pasti masuk tanah itu ke Bangtuh Pak, iya Bangtuh itu bangunan dan tanah dan itu-itu saja penyidiknya Pak dan mereka mengeneralisir kasusnya sama padahal beda-beda Pak, begitu.

Belum masalah warkah yang mereka tidak paham warkah yang palsu jadi asli Pak, yang asli disebut palsu, inikan aneh-aneh Pak, korban masyarakat. *Nah*, ini Pak Menteri tolong dibangun komunikasi dengan Pak Sigit mengenai ini, kalau memang dari pihak kepolisian mau menerima yang betul-

betul ahli di bidangnya Pak, jadi mereka *enggak* perlu belajar lagi. Mereka tinggal merangkum ahli-ahli iya pendapat-pendapatan dari iya teman-teman ATR BPN yang memang sudah betul-betul mapan, sudah paham Pak tentang itu Pak Menteri.

Nah, tentang peradilan Pak Menteri, Bapak bisa cek di Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Tangerang, hakim masalah pertanahan itu-itu saja Pak, pasti Pak, 7 hakim, dia-dia saja Pak. Nanti untuk kasus ini ketuanya si A, kasus ini ketuanya si C tetapi itu kelompoknya Pak.

Nah, ini menurut saya tidak paham tanah Pak, saya 27 tahun jadi pengacara Pak, saya paling paham Pak. Ketika penunjukkan hakim dengan nomor perkara sekian hakimnya pasti si anu, ya si anu Pak, keputusannya iya begitu-begitu saja Pak, sama keputusannya Pak. Yang menang adalah warkah yang palsu. *Nah* inikan aneh-aneh Pak.

Maksud saya, maksud kami ini Pak, supaya Pak Menteri juga membangun komunikasi dengan Ketua Mahkamah Agung. Masukkanlah hakim-hakim Ad Hoc disana, hakim-hakim Ad Hoc tentang pertanahan Pak, bisa kok. Sekarang ada Pak hakim Ad Hoc mengenai tenaga kerja, perpajakan, bahkan perikanan ada sekarang, kenapa pertanahan tidak ada Pak?

Enggak usah kita menuntut di-di dilakukan atau dibuat peradilan pertanahan, cukup masukkan orang-orang pertanahan di sana, selesai ini Pak iya, di tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung. Ini mafia akan hilang Pak, tetapi cukupkan gajinya, gaji orang-orang ATR BPN yang kerja di sana Pak. Kalau *enggak* cukup sama juga bohong Pak. Ini sangat perlu Pak, mereka paham sekali mengenai itu, saya kira ini *point* paling penting.

Terus kalau tadi Pak Menteri mengatakan tentang legalisasi aset dan *reduce* sebanyak 4,5 hektar, 4,5 juta hektar dan itu terdiri eks HGU, tanah terlantar dan tanah negara lainnya serta pelepasan kawasan hutan untuk tora. Saya yakin Pak Menteri akan ada tantangan tentang kawasan hutan, pelepasan Pak, kawasan yang sudah jelas-jelas hak milik saja mereka habiskan apalagi kawasan hutan Pak. Bagaimana kita bicara pelepasan kawasan hutan Pak, ini sangat perlu Pak dan *urgent* Pak Menteri mengenai ini.

Saya kira itu catatan dari saya Pak Menteri, iya mudah-mudahan Pak Menteri tetap semangat dengan etos yang betul-betul luar biasa, bisa menyelesaikan masalah-masalah pertanahan di Indonesia.

Demikian Ketua, terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Terima kasih Pak Junimart.

Pak Syamsurizal.

F-PDIP (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Eh satu lagi Pak, sebentar Pak, mohon maaf Pak Ketua, tentang Bank tanah Pak Menteri.

Ini yang kami dapat informasi Bank tanah ini belum pernah dibicarakan secara detail di Komisi II tentang eksistensinya tetapi Bank tanah sudah bekerja. Dan kami mendengar sudah turun anggaran sebanyak 2,7 atau berapa T lah mengenai ini.

Ini bagaimana sebenarnya Pak, sementara untuk organ-organ apa namanya di bank tanah itu belum kita tunjuk ya belum ada komunikasi dengan Komisi II termasuk Dewasnya Pak, ini bagaimana Pak? Ini sangat perlu Pak, tolong nanti diberikan kepada kami jawaban klarifikasi tentang bank tanah ini, ini kita belum *clear* Pak, bank tanah ini. Kalau bank tanah ini hanya untuk aset-aset pemerintah setahu kami Pak.

Demikian Ketua. Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Terima kasih Pak Junimart.

Pak Syamsurizal.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (DR. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M.):

Terima kasih.

Pak Ketua dan Rekan-rekan,
Pimpinan Komisi II dan,
Yang kami banggakan Pak Menteri dan seluruh jajaran,

Yang pada hari ini lengkap sekali, bukan lengkap tetapi lengkap sekali dengan wamen, dengan irjen dan dengan sekjen dan irjen semua bahkan ada juga didampingi dengan para Kakanwil Pertanahan, belum lagi yang hadir secara virtual. Saya ucapkan selama kepada Pak Menteri.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Kok Bapak tahu Kakanwil yang mana yang Kanwil, saya *enggak* tahu, oh di *zoom* oh.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (DR. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M.):

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Kami ringkas saja barangkali, pertama kami ucapkan selamat dulu pada Bapak menteri, iya capaian pada hari ini, sudah mencapai 70,12% sampai dengan Bulan November, sungguh luas capaian yang cukup tinggi dengan

angka nominal aktualnya Rp5,51 triliun. Hanya saja hibah dalam negeri masih dalam angka 34,48%, masih sangat rendah dibandingkan dengan yang lain sudah mencapai 76% 60% dan 79%, selamat semoga ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

Kemudian saya ingin sampaikan Pak Menteri. Beberapa hari yang lalu kami menerima, kebetulan saya dimintakan oleh Pak Ketua untuk memimpin, menerima kedatangan dari para korban mafia tanah. Mereka berurai air mata menyampaikan hal-hal kepada kami ketika itu. Masyarakat-masyarakat mereka menyampaikan hal-hal yang berkenaan dengan kekayaan harta yang mereka miliki yang dikuras atau diambil oleh pihak-pihak, tanpa kita berikan nama. Apakah dia perusahaan atau PTPN atau apakah dia mafia tanah yang disampaikan kepada kami, tidak saya ceritakan detail. Tetapi mereka dari tanah Tomang Jakarta Barat dari Masyarakat Adat Saman Barat dari Lembaga Investasi dan Pengawasan Aset Negara, kemudian dari Forum Tani Sejahtera Indonesia dan Ibu Hj. Zubaidah dari Cipinang Jakarta Timur, Bapak Rufi Wahyudi, kemudian Forum Korban Mafia Tanah Indonesia yang membawa beberapa case lainnya secara tersendiri, kemudian Ibu Sri Kurniati dan juga dari DPRD Maluku, termasuk di dalamnya tanah milik masyarakat Kabupaten Bengkalis yang sudah disampaikan begitu lama namun belum kelar sampai dengan hari ini.

Oleh karena itu kami ingin menyampaikan ini dan kami mensepakatinya dan sudah berkesimpulan bahwasannya Komisi II ini akan membahas khusus masalah pertanahan dengan kementerian terkait yakni Menteri ATR, Kemendagri, Kementerian Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Kementerian PUPR dan Kementerian BUMN, PTPN dan pihak dari TNI sendiri, karena mereka menyampaikan ada keterlibatan anggota TNI.

Kemudian kita berkesimpulan juga Komisi II ketika itu kepada para pengadu yang haknya dirugikan diminta untuk melengkapi data dan menyampaikan hal itu kepada kami dan kami dari Komisi II sudah melakukan *mapping* masalah-masalah pertanahan dan akan semakin lengkap kalau mereka sudah melengkapi bahan-bahan mereka.

Kami dari Komisi II ketika itu hampir mensepakati untuk membentuk panja dan kami akan membahas ini secara lebih mendetail dan final kalau bisa bersama dengan kementerian terkait. Hal ini kami sampaikan karena ini akan menyangkut *image* masyarakat kepada Komisi II kalau hal-hal yang mereka adukan kita tidak bisa menanggapi, tidak meresponnya secara baik, *nah* itu yang pertama.

Yang kedua terkait juga dengan suasana kedepan ini Tahun 2023 itu adalah tahun terakhir kami untuk bersikap kepada masyarakat dan ini juga menyangkut dengan nama pribadi kami, baik itu sebagai anggota partai yang musti kami bela, kemudian begitu juga dengan *image* kami secara pribadi Anggota DPR RI, Komisi II yang mereka percayakan. Mereka pilih kita untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat itu.

Oleh karena itu satu dari *case* ini kami sampaikan kepada Pak Menteri. Mohon izin Pak Ketua kami menyampaikan langsung administrasinya kepada Pak Menteri. Dan rekapitulasi secara umum dari 10 kasus yang mereka sampaikan kepada kami pada hari itu rapat kita pada tanggal 4 November tahun 2022 ini, artinya seminggu yang lalu.

Saya kira demikian dari kami. Izinkan saya minta waktu sedikit, mungkin perlu dokumentasi kalau ada yang bisa, tanggungjawab kita kepada masyarakat.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Iya silakan Pak.

F-PG (AGUNG WIDYANTORO, SH, M.SI):

Ketua.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Fotonya dari Dapil.

F-PG (AGUNG WIDYANTORO, SH, M.SI):

Interupsi Ketua, interupsi Ketua.

Pimpinan tetap di tempat duduk situ, Pak Sekjen mewakili Pak Menteri ya, jangan Pimpinan turun dari mimbar.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Iya silakan.

Itu yang Pak Junimart Dapil saya juga Pak, sama Pak.

Terima kasih Pak Syamsurizal.

Pak Gaus.

F-PAN (DRS. H. GUSPARDI GAUS, M.SI.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Pimpinan dan Anggota Komisi II yang saya hormati,
Bapak Menteri ATR BPN Hadi Tjahjanto,

Saya baru kali ini bertatap muka langsung dengan Bapak, dulu yang hadir adalah Pak Wamen, itu adalah sebuah keniscayaan bagi saya untuk menyampaikan selamat, Bapak diberi amanah sebagai Menteri ATR BPN oleh Pak Jokowi.

Saya yakin dan percaya ada tugas-tugas khusus yang diberikan ke Bapak sebagai mantan Pangab. Banyak harapan dan tumpangan yang ada di pundak Bapak pada hari ini karena hal-hal yang berkaitan tugas, fungsi, wewenang Kementerian ATR/BPN ini sangat-sangat berat dan banyak-banyak masalah, salah satu diantaranya apa yang dipaparkan oleh Pimpinan tadi.

Saya sangat sering tampil di El Shinta Pak, 25% bicara tentang masalah tanah dan itu dengar dari Aceh sampai Papua Pak dan memberikan harapan dan keinginan kepada Pak Cahyo, Pak Hadi Tjahjanto untuk bisa *survive* dalam mengemban tugas itu. Ini tentu beban berat Pak. Tentu saya berharap Pak Hadi bisa melaksanakan sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat itu, yang pertama.

Yang kedua adalah saya masuk kepada paparan yang Bapak sampaikan, dimana dikatakan bahwa anggaran tahun 2022 itu adalah Rp7,858T. Pada 15 November kata Bapak di dalam makalah ini, itu sudah tercapai realisasinya Rp5,51T, sama dengan 70,12%. Menurut hemat saya ini sesuatu yang lumayan tetapi belum signifikan, manakala dibagi Rp7,858T itu dibagi 12, itu tidak pas juga untuk dilakukan pembagian seperti itu, tetapi harapan saya adalah janganlah di akhir anggaran staff Bapak tergopoh-gopoh dalam menyelesaikan dan merealisasikan anggaran sesuai dengan harapan dan keinginan kami capaiannya itu, tentu kalau dapat di atas 98%.

Oleh karena itu kerja-kerja keras Bapak sebagai komandan tentu harus secara terus menerus, menyapa, mengingatkan staff Bapak sehingga ini juga merupakan rapor bagi Bapak sebagai orang yang meneruskan kepemimpinan Bapak Sofyan Djallil.

Namun dari paparan yang Bapak sampaikan ada beberapa hal yang tentu ada persoalan terhadap capaian secara rinci yang Bapak jelaskan di halaman 4 terutama capaian-capaian di bawah 60% yaitu per sub RDTR itu hanya 41,48%. Di atas 99% saya tidak mempertanyakan dan hanya memberikan apresiasi.

Kemudian yang kedua adalah redistribusi tanah sesuai yang Bapak laporkan pada hari ini di 15 November capaiannya baru 53,215% sedangkan akses reform target yang 129.600 KK terrealisasi baru 52,69% atau 68.280%. Tentu saya mempertanyakan tentang kekurangan maksimal dalam merealisasikan ini, apa persoalannya, apakah masalah anggaran atau faktor-faktor lain dan lain sebagainya. Ini sengaja kami kritisi agar lompatan-lompatan yang waktu tinggalnya itu 1 bulan lebih ini bisa *survive* apa yang menjadi harapan dan keinginan Bapak. Tentu juga kami yang merupakan mitra Bapak punya tugas dan tanggungjawab untuk men-*support* untuk mendorong capaian-capaian itu tentu sangat-sangat kami harapkan.

Kemudian di halaman 6 saya masih mengacu pada paparan Bapak yang ini Pak, iya, sama ya Pak. Ada juga yang melampaui batas. Tentu saya bertanya saya memang baru di DPR RI tetapi saya di DPRD Sumbar 3 periode Pak dan selalu jadi Badan Anggaran. Yang ingin saya pertanyakan adalah tentang tanah transmigrasi ini, ini capaiannya baru 21 Pak, ini tentu sangat memiriskan, tanah transmigrasi sertifikasi hak tanah milik yang targetnya 0,6 juta hektar terealisasi baru sekitar 126, ini apa masalahnya Pak? Supaya kami juga paham, apa yang harus kita lakukan, waktu yang tinggal 1 bulan 10 hari lagi. Tentu kita tidak menginginkan rapor di bidang ini merah kalau capaiannya tidak signifikan sebagaimana pada bidang-bidang yang lainnya.

Kemudian yang lain adalah tentang pelepasan kawasan hutan. Itu lebih memiriskan lagi hanya 8,13% targetnya adalah 1,6 juta terealisasi baru 333.000 hektar ini juga tentu, apakah ketika membuat perencanaan terlalu tinggi targetnya sehingga capaiannya juga tidak terpikul. Ini tentu perlu juga bidang perencanaan dalam melakukan analisis SWOT terhadap persoalan ini.

Di satu sisi, ada dua hal yang signifikan, dua hal yang signifikan melampaui batas yang sangat luar biasa. Ini juga masalah perencanaan, masa bisa capaiannya 170% ada 296%, apakah karena targetnya dibuat rendah, sehingga capaiannya signifikan? Ini bagi orang perencanaan ini juga dipertanyakan. Dan saya juga tentu menanyakan, kenapa, apa persoalannya dan lain sebagainya.

Kemudian yang terakhir adalah tentang penanganan kasus. Bapak sudah memaparkan ada 6 persoalan pokok yang Bapak sampaikan di akhir daripada kesimpulan ini. Gambaran yang Bapak sampaikan saya tidak mendapatkan data yang pas, misalkan Bapak menyampaikan penyelesaian kasus melalui ini, belum nampak bagi saya pribadi tentang tolak ukur daripada penanganan kasus-kasus pertanahan yang enam *item* yang Bapak sampaikan ini. Artinya tidak nampak bagi saya secara pribadi terhadap enam item ini proses penanganan kasus-kasus pertanahan itu bagaimana? Apakah sudah 50%, 70%, 80%, *nah* itu yang terakhir.

Kemarin ini kami menerima Forum Korban Mafia Tanah Indonesia. Saya mengundang Pak. Karena sudah sangat sering bicara di El Shinta, kata saya jangan hanya ke saya, tolong sampaikan kepada Bapak-Bapak yang ada di Komisi II dan Pimpinan sekaligus tentang apa persoalan yang menjadi beban dan tadi sudah agak disinggung, agak disinggung oleh Pak Syamsurizal tadi.

Persoalan korban mafia tanah, jadi forum korban mafia tanah, *sample*-nya di undang beberapa kabupaten/kota dan provinsi dari Sumatera Barat. Saya Pak Guspari Gaus dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Daerah Pemilihan Sumatera Barat. Yang ketika itu juga datang ke sini Pak, ada yang saya undang dan ada juga yang bernaung di bawah forum korban mafia tanah itu.

Miris Pak, menangis mereka-mereka di sini Pak tentang mafia tanah Pak, dia punya tanah, dia menguasai sekonyong-konyong datang. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Junimart saya akan menyinggung sedikit tentang

persoalan mafia tanah itu. Pintu gerbang daripada lolos tidak lolosnya mafia tanah dalam mencaplok saya tidak masuk ke ranah hukum, tentu pintu gerbangnya ada di jajaran ATR BPN sebagai bawahan Bapak.

Ini merupakan, ini Pak Hadi Tjahjanto ini maaf saya mengelu-elukan Bapak di forum-forum manapun, karena apa? Tidak ada yang di atas Bapak para militerkah, polisikah, pasti saya yakin dan percaya itu bisa Bapak libas orang-orang yang melakukan itu, itu selalu saya dengungkan. Tetapi setelah itu saya ditagih janjinya, mana harapan dan keinginan kami ini Pak. Apa yang sudah dilakukan oleh Pak Hadi? Kata saya jangan terlalu terburu-buru, bagaimanapun beliau tentu akan melakukan konsolidasi, melakukan pendataan, pembenahan dan lain sebagainya. Saya katakan semenjak Pak Hadi Tjahjanto sebagai Menteri, kata saya sudah banyak orang yang terkena kasus, ada yang di KPK kan dan lain sebagainya. Selama ini, ini tidak pernah, itu adalah bagian dari kerjanya dari Pak Hadi Tjahjanto, begitu saya membela Bapak walaupun Bapak tidak tahu apa yang saya ungkapkan.

Oleh karena itu pintu gerbang ini perlu kehati-hatian dalam merubah sertifikat tanah itu Pak. Bagaimanapun saya juga dengan Pak Junimart dalam berbagai event forum keadilan kami tampil beberapa kawan. Masalah mafia tanah kata saya, tidak terlepas dari orang dalam, itu yang pertama. Kalau orang dalamnya kuat, apapun *Insya Allah* tidak akan terjadi. Tetapi karena ikut berkolusi didalamnya oknum-oknum yang saya sebutkan tentu ini menjadi sesuatu yang memiriskan Pak. Persoalan ini sangat luar biasa.

Apalagi kemudian masalah notaris, notaris juga abai dalam menyikapi siapa pembeli, siapa penjual semuanya bodong. *Nah* bagaimana ini juga bisa dilakukan kerjasama bagaimanapun notaris yang juga merupakan izin dari BPN ATR untuk mengeluarkannya ini, tentu harus ada juga fakta integritas yang dilakukan, kalau tidak dicabut dia sebagai orang pencatat tanah itu.

Yang kemudian adalah cukong, kemudian pembeking, tentu pembeking takut dengan Pak, pembeking itu pangkatnya siapa yang diatas Pak Hadi Tjahjanto, apalagi mantan Pangab, tentu tidak mungkin mereka-mereka itu leluasa seperti masa-masa lalu.

Kemudian adalah eksekutornya, jadi artinya apa? Mafia tanah gampang untuk diselidiki, mafia tanah gampang untuk diproses hukum. Sekarang persoalannya adalah beranikah Bapak Menteri ATR BPN dalam menyelesaikan itu? Barangkali itulah hal-hal yang saya sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Wa'alaikumsalam warahmatullah.

Terima kasih Pak Gaus.

Pak Cornelis.

F-PDIP (Drs. CORNELIS, M.H.):

Terima kasih Pak Ketua.

Yang terhormat Ketua dan Wakil-wakil Ketua, serta Rekan-rekan Anggota Komisi II yang kami hormati dan kami banggakan, Yang terhormat Pak Menteri ATR BPN dan Wakil Menteri ATR BPN beserta seluruh jajarannya,

Pertama-tama kita mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, kita masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani yang baik, sehingga pada siang hari ini, sore hari ini, kita masih bicara, masih membahas masalah kepentingan bangsa dan negara ini.

Selamat sore,
Salam sejahtera untuk kita semua,

Pertama, saya tunjukkan kepada Bapak Menteri. Kenapa Kanwil ATR-BPN Kalimantan Barat terlalu lama kosong? Seharusnya kan 3 bulan atau 6 bulan yang bersangkutan mau pensiun, sudah disiapkan itu. Sudah dimasukkan didalam personalianya untuk mengkaji, kenapa kosong lama-lama? Sedangkan Bapak mengumandangkan ATR-BPN siap 24 jam.

Nah, ketika saya kunjungan ke sana, saya minta data, data mengenai tenaga honorer atau apapun namanya, datanya tidak tersedia. Saya bilang cukup saja di WA atau sebutkan berapa jumlahnya selesai. Apakah yang bersangkutan takut karena tidak dibiayai oleh APBN atau apa, atau ada atau tidak ada? Karena nanti malam kami akan bicara masalah tenaga honor ini, sudah lintas komisi. Karena di semua departemen, non departemen sampai kepada pemerintah daerah itu ada. Apakah ini mau dipecat sesuai kemauannya Presiden atau tidak?

Nah, yang ketiga, sebagaimana disampaikan oleh Pak Wakil Ketua kami tadi Pak Junimart Girsang bahwa izin lokasi yang diberikan oleh Bupati itukan bruto bukan *nett*, harusnya yang menyeleksinya adalah ATR BPN. Tetapi langsung saja dibuatkan HGU sesuai dengan izin lokasi itu. *Nah*, ini yang membuat masalah, harusnya diselidiki dulu, di-*inclup*, mana yang masuk kampung, masuk kuburan. Karena dalam SK pencadangan lahan itu sudah dirinci. Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Selain daripada itu nakal lagi dia, dia tanam di luar izin yang sudah dia berikan, itu terjadi.

Nah, selanjutnya untuk merevisi HGU yang seperti ini, apakah sudah ada dia lakukan regulasinya, supaya tidak harus mendahului keputusan pengadilan. Kalau dulukan selalu melalui keputusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum, yang pasti dan tetap, inkrah. *Nah*, kalau memang sudah ada regulasinya itu tolong pendelegasian wewenang kepada Kepala Kantor Kabupaten itu, supaya mereka bisa merevisinya.

Nah, untuk tahun 2024 mereka itukan selalu kesulitan anggaran Pak. Saya pernah tanya kalau mereka turun bagaimana caranya. Kalau mau minta-minta dengan orang juga tidak enak minta dengan kepala daerah juga tidak enak. Kalau bisa memang siapkan juga anggaran, kita akan ketok dan saya akan kawal di Banggar, jangan khawatir.

Nah, yang terakhir mengenai apa yang juga dikatakan oleh Pak JG tadi, masalah sertifikat sudah keluar, sudah ada, tahu-tahu jadi kawasan hutan. *Nah*, ini sebenarnya bukannya salah ATR BPN Pak. Dulu kita menggunakan peta hutan kesepakatan, tetapi ketika pada tahun 2013 keluar peta baru 733 kalau tidak salah, lalu masuk itu didalam kawasan hutan. *Nah*, ini yang perlu dikoordinasikan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi, dulu kita pakai peta hutan kesepakatan, ATR BPN itu pakai itu, *nah* waktu itu kita sepakat. Ketika keluar Surat Keputusan Menteri 733 tahun 2013, *nah* itu yang bikin penyakit, sehingga banyak orang-orang ATR BPN dipenjara, padahal ini bukan kesalahan ATR BPN.

Maaf Pak saya pelaku ini Pak, saya ini pelaku sejak zaman Pak Harto, prona, kami bikin prona itu sama-sama Pak. *Nah*, ini hutan kesepakatan ini ketika 733 keluar oleh kementerian Zulkifli Hasan itu menjadi masalah. *Nah*, ini saya punya petanya, saya punya datanya, data zaman dulu, zaman kuno, kalau sekarang enak digital kita GPS saja kan selesai. *Nah*, ini sebenarnya bukan kesalahan murni daripada ATR BPN.

Nah, Bapak baru masuk di dunia agraria dan tata ruang ini ya memang masalahnya memang rumit Pak masalah tanah ini, saya saja sekolahnya pening kepala. Para ahlinya di Indonesia ini tidak banyak, hanya beberapa orang. Sebagaimana dikatakan beliau tadi kalau memang bisa itu tarohlah orang-orang ATR BPN yang paham di aparat penegak hukum. Karena yang perdata bisa dirubah jadi pidana Pak. Jadi ATR BPN ini jadi bulan-bulanan, kasihan mereka. Bukan karena saya mantan pegawai lalu bela pegawai tidak. Tetapi itulah fakta yang terjadi. Kasihan mereka dan mereka tidak bisa mengecek barang ini palsu atau tidak palsu karena tidak ada kewenangan, yang berwenang adalah pihak kepolisian yang punya lapor.

Saya rasa itu Pak pemikiran-pemikiran saya, dan saya mohon maaf, saya bukan mengkritiki atau tidak puas terhadap kerja ATR BPN, tetapi kita harapkan di bawah kepemimpinan Bapak ini seorang jenderal bintang empat mantan Panglima TNI. Mudah-mudahan mereka itu takutlah untuk bermain atau seganlah untuk jadi mafia tanah atau main seenak-enak mereka.

Saya rasa itu, sekian terima kasih.

Selamat sore,
Salam sejahtera untuk kita semua,

Terima kasih Pak Ketua.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Terima kasih Pak Cornelis.

Pak Rahmat.

F-GERINDRA (H. RAHMAT MUHAJIRIN, S.H.):

Terima kasih.

Ketua, Wakil Ketua,
Bapak/Ibu Anggota Komisi II yang kami hormati,
Bapak Menteri,
Pak Dirjen serta staff kementerian yang kami muliakan,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih atas waktunya Ketua.

Pak Menteri,

Pertama-tama, izinkanlah kesempatan ini saya mengucapkan rasa terima kasih terutama kepada jajaran Bapak yang di bawah yaitu Kanta I Sidoarjo dan Kanta, ulangi Kanta Sidoarjo dan Kanta I dan II Surabaya, serta Pak Kanwil, Pak Irjen serta Dirjen.

Di mana Pak terus terang saja, kami dengan adanya menduduki Pimpinan Kementerian ini, kami yang selama hampir dua tahun ya, menyampaikan aspirasi ke Kanta I Sidoarjo ini ketika Bapak menduduki Menteri ini bisa terealisasi Pak.

Terus terang saja kami jadi tumpuan untuk jembatan ke kementerian atau ATR BPN ini Pak, perihal penyelesaian masalah-masalah tanah warga korban lumpur lapindo Pak. Karena sampai hari ini banyak sekali warga yang sudah mendiami rumah-rumah dari hasil ganti rugi dulu itu sampai hari ini tidak mempunyai sertifikat atau tidak jelas hak status tanah yang ditempati.

Akhirnya beberapa bulan yang lalu bertempat juga dengan pergantian kepala kantor pertanahan Sidoarjo Pak kami dibantu *Alhamdulillah* 658 KK dalam satu lokasi, ini hampir sudah selesai untuk pengajuan sertifikatnya, menyusul lagi sekitar 300 KK dan sekitar 280 KK. Kami tetap memohon bantuan Bapak pengawasan pembinaan ke jajaran bawah karena di Sidoarjo ini Pak masih banyak lagi masalah-masalah status tanah warga yang masih jelas statusnya Pak.

Yang kedua Pak, kami sampaikan juga, kami terima kasih juga kepada Kanta I Surabaya dan Kanta II Surabaya karena sudah menjawab, berani menjawab Pak, surat yang diajukan oleh Asosiasi Penghuni Rumah Tanah Negara, Penghuni Rumah dan Tanah Negara. Juga sudah berani menjawab surat konfirmasi yang diajukan oleh warga Waringin Joyoboyo. Ini kaitannya

dengan tanah KAI Pak. Di mana di jawaban di dua Kanta tersebut disampaikan bahwa tidak ada *database* disetiap kantor pertanahan tersebut tentang tanah itu milik KAI. Cuman ada klaim memang dari PT KAI.

Nah, untuk kelanjutannya Pak dari surat Kanta cabang kantor tersebut, kami lagi berpikiran untuk bertindak seperti apa namun demikian sekali lagi Pak, kami tetap mohon pengawasan dan pembinaan Bapak ke bawah, agar supaya permasalahan-permasalahan tanah di Surabaya ini juga selesai.

Perlu kami sampaikan Pak, ada sekitar 54.000 KK Pak, kalau kereta api kami tidak bicara bidang Pak, tapi KK yang kaitan sengketa dengan PT KAI dan BUMN lainnya. Ini kami mohon juga perhatian Pak Menteri.

Yang terakhir Pak, kaitan dengan surat hijau. Kami kemarin Komisi II mengadakan kunjungan kerja ke khusus ke Kanwil Jatim didampingi atau bersama dengan Pak Sekjen Pak. Kami mendapat jawaban dari Kanwil Jatim masalah penyelesaian surat izin itu, kalau menurut kami ini jawaban yang mundur.

Karena pada saat itu disampaikan oleh Kakanwil Jatim, penyelesaian surat hijau, ini diminta untuk berpedoman pada Peraturan Daerah, Peraturan Daerah Kota Surabaya dan Prowali Kota Surabaya. Padahal kalau kita lihat Pak Peraturan Daerah Kota Surabaya ini kalau enggak salah No.16 Tahun 2014. Kemudian peraturan Perwalinya ini No. 51 Tahun 2019 yaitu tentang pelepasan tanah aset pemerintah Kota Surabaya dan tata cara pelepasan tanah aset Pak. Ini tidak sampai hari ini belum dilaksanakan dan kenapa saya sampaikan kemunduran, karena pihak Bapak sendiri, pihak kementerian waktu itu Pak Sofyan Djalil itu juga kirim surat ke Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tentang rekomendasi penyelesaian sengketa surat ijo. Surat ini ditandatangani Pak Menteri, 24 Juni 2019 Pak.

Jadi, kemarin Pak Kanwil ya menjawab kita berpedoman pada Perda Tahun 2016 padahal ada surat Pak Menteri yang waktu Pak Sofyan Djalil tahun 2019 makanya kami sampaikan kemunduran dan surat Pak Menteri, Pak Sofyan Djalil belum juga dilakukan Pak.

Kami melihat sebetulnya permasalahan surat ijo ini Pak, kalau kita berpedoman pada peraturan daerah, itu tidak mungkin bisa dilaksanakan karena di sana disampaikan bahwa itu aset bisa dilepas yaitu yang memegang IPT dari aset kota. Padahal aset kota ini Pak diperoleh dari HPL. HPL ini kan yang mengeluarkan kan instansi Bapak, artinya tanah negara. Jadi IPT ini Pak terbit atas dasar HPL atau tanah negara itu. Makanya tidak bisa dilepaskan ketika HPL belum dikembalikan lagi ke negara dalam hal ini ke ATR BPN. Kalau HPL ini sudah dikembalikan ke negara ke ATR BPN, saya yakin itu bisa dilaksanakan Pak untuk pelepasan apa surat ijo itu tadi.

Kami juga tidak paham Pak Menteri masalah surat ijo ini kenapa sangat lama dan berlama-lama sekali ya. Kalau kami lihat Pak sejarahnya masalah surat itu sebetulnya sejak adanya Undang-Undang tentang Pembentukan Pemerintah daerah Swatantra yaitu tahun 50 sampai dengan hari ini Pak. Di

mana pada saat tahun 50 itu ya, diundangkannya pembentukkan daerah Swatantra, akhirnya pemerintah kota ini akan berusaha untuk memiliki wilayah atau tanah, baik untuk dipakai sendiri ataupun untuk penyelenggaraan pemerintahan kotanya. Dan ini Pak, masalahnya terus bertumpuk-tumpuk ya, disana ada hukum yang tumpang tindih, akhirnya adanya permasalahan IPT ini Pak.

Untuk itu Pak Menteri kami mohon bantuan Pak Menteri juga untuk membentuk tim dalam rangka menyelidiki dan menyidiki, serta menganalisa-menganalisa dengan komprehensif Pak masalah surat ijo ini. Apalagi hari ini Pak isunya sudah ke peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi.

Tadi kami sampaikan Pak ada 85 HPL, kalau menurut data yang dulu pernah kami ambil dari Dinas Pertanahan Pak, *nah* untuk mempertahankan surat, untuk mempertahankan HPL atau surat izin ini Pak, sampai pemerintah kota itu dulu pernah mempunyai Dinas Pertanahan.

Dari data Dinas Pertanahan ini Pak yang kami peroleh pada saat itu hak pakai, hak pakai kota Surabaya ini sejumlah 522.259 meter persegi. Kemudian hak pengelolaan itu ada 6.811.735 meter persegi. Kemudian bekas *eigendom* itu ada 4.298.569 meter persegi, *slut* atau dari hasil keputusan itu 410.634 meter persegi. Kemudian dari berita acara pelimpahan antar instansi ini mungkin Pak atau badan hukum itu sejumlah 714.263 meter persegi. Lain-lain tanah negara dalam pengelolaan, iya ada 1.077.077 meter persegi. Saya total ada 13.835.230 meter persegi.

Kalau kami konversikan terhadap pungutan retribusi Pak yang per meter persegi yang rupiahnya kami juga hari ini masih belum dapat data, iya sudah berapa ratus miliar atau triliun mungkin ini Pak. Tetapi data terakhir PAD Kota Surabaya dari hasil retribusi ini hanya 77 miliar.

Inilah Pak kami mohon perhatian Pak Menteri, karena masalahnya ini sangat pelik sekali. Di samping itu Pak kita juga menginginkan bahwa pemerintahan Kota Surabaya ini memang pemerintahan yang bersih dan berwibawa Pak.

Dan satu lagi Pak kalau kita bicara soal tanah ya kami mohon juga Pak, artinya prinsip-prinsip di dalam Undang-Undang Dasar 1945 di mana bumi, air, udara dan kekayaan alam yang berada didalamnya ini memang betul-betul untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Kalau ini terus berlangsung efeknya juga terhadap ekonomi rakyat. Di mana mungkin nanti apa namanya, investasi juga di Surabaya juga *enggak* akan jalan. Seperti itu dulu Pimpinan yang kami sampaikan.

Terima kasih Pak Menteri.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Pak Rahmat.

Saya ingatkan saja bahwa kita waktunya terbatas, seperti dalam aturan maksimal 5 menit, jadi coba diatur saja dan Pak Menteri ya ini begini, kasusnya pasti banyak terus ini setiap ini.

Pak Riswan Tony.

F-PG (Drs. H. RISWAN TONY, DK):

Terima kasih Ketua.

Saya mungkin dua menit saja Ketua.

Yang terhormat Pak Menteri ATR BPN beserta jajarannya,
Ketua dan teman-teman Komisi II yang saya hormati,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Pak Menteri,

Tadi saya sudah mendengar banyak sekali masukkan, apalagi sudah di borong oleh Pak Ketua JG tadi, hampir semuanya sudah ada, terhadap mafia tanah Pak Ustadz, Pak Menteri. Problem-problem semua hampir di Indonesia khususnya diperkecil daerah Dapil saya Pak, Lampung Pak, itu perusahaan-perusahaan besar, banyak sekali permasalahan tentang tanah ulayat yang diambil atau masuk di dalam lahan HGU-nya Pak.

Kemarin awal-awal Pak Menteri saya senang sekali bahwa Bapak mau *gas pool* terhadap pengukuran lahan Pak, pengukuran tanah. Kita di Komisi II ini juga ada Panja Pengukuran Tanah maupun Panja Mafia Tanah. Dalam kesempatan ini tentunya saya berharap Bapak datang ke Lampung Pak, untuk konferensi *pers* sama-sama untuk mengukur ulang Pak, karena setiap persoalan tanah di sana apabila ada tanah ulayat. Kemarin juga datang ke sini Pak, Buaya Mencurung itu ribut dengan PT. Sheet dari Sinarmas kalau tidak salah Pak. Kita kawan yang paling jalan tengah adalah mengukur kembali Pak terhadap lahan HGU-nya tetapi kebanyakan perusahaan itu agak keberatan Pak. Begitu juga terhadap di situ yang paling besar adalah lahan-lahan Sugar Group itu di mana izinnya 55.000 tetapi kenyataan lahan yang ada sekitar 125.000 hektar.

Nah, pengukuran sekarang ini kan sudah canggih Pak Menteri terhadap perhitungan melalui satelit ini, hanya berdasarkan apa koordinatnya sudah tahu Pak. Apalagi teman-temannya Pak Himawan yang di Prei itu sudah punya alatnya semua Pak. Mulai dari lahan yang 100 meter sampai yang 100 juta hektar, mereka bisa hitung Pak dari kantornya ini Pak. Jadi, sudah kasat mata,

mau tidak mau ATR BPN harus melakukan ukur ulang Pak. Ada satu, dua contoh yang di negara kita ini yang benar-benar harus diukur ulang Pak. Sehingga ada nama juga Pak Hadi terhadap kementerian apa ini, setuju ya Pak JG ya? Silakan saja di mana mau di Lampung, di Sumatera Utara yang jelas ada contoh bahwasannya ada penyimpangan terhadap HGU.

Nah, masalah biaya Pak. Saya pikir bisalah dianggarkan, ini ada Pak Agung sebagai Anggota Banggar maupun teman-teman yang lain. Jadi jangan dipersoalkan karena masalah anggaran Pak. Karena ini tugas negara jadi tolong Pak. Saya lebih senang sekali kalau seandainya di Lampung, Bapak bisa melakukan pengukuran ulang dalam waktu dekat ini kita ke Lampung sama-sama, kita konferensi pers Pak untuk melakukan ukur ulang Pak. Karena hampir semuanya Pak yang besar-besar di sana bermasalah dengan tanah ulayat. Itu ya Pak ya terhadap tugas kita.

Yang kedua terhadap intern Bapak, bagaimana kita mendisiplinkan orang atau disiplinkan arsip Pak, kalau arsip Bapak aja berantakkan Pak, di *bundel-bundel*. Jadi saya sudah beberapa kali, hampir setengah Indonesia lah kantor BPN baik Provinsi maupun yang Kakan, berantakkan Pak.

Jadi, kalau misalnya orang mau ngecek sertifikat, bisa satu jam sehari itu agak heran Pak, karena saya bertanya kepada yang jaganya itu, seminggu aja belum tentu ketemu Pak, karena berantakkannya Pak. Jadi tolong dibenahi lagi, kalau bisa dengan arsip yang canggih Pak, anti air, anti kebakaran, anti rayap Pak. Saya pikir tidak terlalu mahal itu Pak Sekjen dan bisa dianggarkanlah ya.

Karena kalau kita melihat Komisi sebelah Pak, Komisi III Pak, mungkin Pak Hadi juga pernah di sana, itu royal benar Pak untuk bangun satu Gedung penjara kek apa, kok kita membangun satu Gedung yang di bawah 10 miliar aja agak sulit Pak untuk BPN ini Pak, jadi agak miris Pak. Jadi tolong diperhatikan itu saja yang untuk intern Pak khususnya arsip maupun gedung-gedung kantor yang belum punya kantor, apalagi masih sewa dan Kakan di Lampung mungkin separuhnya sewa Pak.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRLANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Wa'alaikumsalam.

Terima kasih Pak.

Silakan Ibu Dian.

F-PAN (DIAN ISTIQOMAH):

Terima kasih Pimpinan.

Terima kasih juga kepada yang hadir pada hari ini teman-teman di Komisi II.

Yang terhormat Bapak Menteri,
Pak Wamen, Pak Dirjen dan semua jajarannya,

Saya akan memberikan beberapa, mungkin masukkan Pak Menteri, jadi beberapa dekade ini, memang kita semuanya disibukkan dengan mafia tanah, banyak sekali permainan-permainan mafia tanah di sini. Dan ini akan erat sekali hubungannya dengan bagaimana sih Undang-Undang Pertanahan di negara kita. Apakah mungkin kita bisa memperbaharui Undang-Undang Pertanahan? Yang kami tahu Undang-Undang Publikasi yang kita punya itu, Undang-Undang Publikasi negatif. Jadi, kalau bisa, kita bisa mengarah Undang-Undang Publikasi ini ke arah yang positif.

Seperti yang pernah saya pelajari kalau di luar negeri itu, itu menggunakan Undang-Undang Publikasi Positif. Jadi hak-hak para yang mempunyai hak tanah, hak milik ini menjadi terjamin. Sedangkan kalau di Indonesia ketika orang membikin sertifikat atau mempunyai sertifikat ataupun jual beli, mereka itu selalu membayar pajak Pak dan pajak ini PPHTB dan lain-lain itu otomatis diterima sama negara. Tetapi setelah ada permasalahan dengan sertifikat yang sudah diterbitkan sama BPN, BPN tidak bisa berbuat apa-apa juga.

Seperti di Duri Kosambi, mungkin Pak Menteri sudah bertemu beliau-beliau, *sorry* di Duren Sawit, maaf karena banyak sekali permasalahan di Jakarta ini, di Duren Sawit. Sekelompok rumah mewah yang sudah mempunyai hak milik ternyata itu sudah ada inkrah tahun 1995. Itu sudah berapa puluh tahun dan baru sekarang mau di eksekusi.

Saya datang kesana pertama satu hari setelah mereka mau dieksekusi dan saya *follow up* langsung Pak Menteri sampai saat ini. Mudah-mudahan nanti ada penyelesaian karena menurut beliau-beliau sudah menemui Pak Menteri langsung.

Yang kedua, apakah tidak mungkin kalau segera kita bisa bentuk peradilan pertanahan. Benar sekali tadi apa kata Pimpinan kami, apa kata Bang JG, peradilan di Indonesia ini ya masih begitu-begitu saja. *Nah, enggak* ada salahnya kita ini membentuk peradilan pertanahan, bisa berdiri sendiri Pak Menteri, bisa mandiri dan orang-orang yang didalamnya otomatis orang-orang yang paham pertanahan.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Sebentar Ibu Dian.

F-PAN (DIAN ISTIQOMAH):

Siap.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Iya ini sebagai informasi kalau peradilan pertanahan ditolak.

F-PAN (DIAN ISTIQOMAH):

Oh siap.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Jadi kita fokus saja bagaimana caranya supaya teman-teman dari ATR BPN ini bisa masuk di sana, saya kira begitu Ibu Dian.

F-PAN (DIAN ISTIQOMAH):

Oh baik.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Sudah ditolak itu, Bu.

Iya silakan.

F-PAN (DIAN ISTIQOMAH):

Saya ajukan lagi Pimpinan mohon maaf. Kalau ditolak saya ajukan lagi.

Selanjutnya kita sebenarnya bisa memperkuat dan memperbanyak para Satgas mafia tanah Pak Menteri. Jadi, saya berharap untuk Satgas mafia tanah ini tidak cuma di atas saja, kita bisa turun ke bawah biar semua permasalahan pertanahan selesai. Karena puter-puternya cuma di situ saja, penyelesaiannya kadang kita mentok. Sudah sampai kejaksaan mentok. Jadi semuanya kan bertemu ini di pengadilan. Sedangkan untuk orang-orang kecil untuk membayar sampai ke pengadilan itu, itu sangat membutuhkan biaya, biaya, tenaga, waktu dan tidak ada habisnya, 10 tahun *enggak* selesai, 8 tahun *enggak* selesai, ini permasalahan yang ada.

Tentang ada satu hal Pak Menteri, itu ada tanah di Jakarta Barat. Tanah itu menjadi perebutan dua pihak. Yang satu beranggapan kalau pihak yang mengakui tanah itu mempunyai pelepasan hak palsu dan non identik. Apakah mungkin yang namanya non identik itu, itu palsu atukah, karena gini ketika kita bertanda tangan, itu tidak semua tanda tangan kita itu sama begitu loh. Karena dua-duanya ini mengadu ke saya. Setelah saya telusuri sejauh ini, itu ada indikasi yang mengadukan ini mempunyai sertifikat lagi yang diduga palsu. Dan sertifikat itu setelah kami cek di BPN itu memang beda. Jadi, kami mempunyai fotocopy-an dari sertifikat itu dan ada salinan yang di BPN, itu memang beda.

Dari kedua belah pihak sudah saling melapor, setelah itu kalau sudah jelas mana ini yang palsu kenapa dari pihak Kepolisian, dari Polda itu tidak cepat gercep begitu loh, menunggu lagi sertifikat yang asli, kan sebenarnya dari sertifikat fotocopy itu, itu sudah jelas, sudah bisa dianggap itu palsu walaupun yang diterima yang dibuktikan di Polda itu hanya fotocopy.

Untuk hal-hal seperti ini, seandainya kita ini mempunyai apa peradilan pertanahan itu akan lebih *simple* menurut saya. Jadi walaupun tadi Pimpinan kami tadi mengatakan itu ditolak itu mohon di kaji ulang, itu saja sih Pak Menteri, Pak Wamen dan semua Pak Dirjen yang hadir di sini.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Wa'alaikumsalam.

Terima kasih Ibu Dian.

Silakan Pak Endro.

F-PDIP (Ir. H. ENDRO SUSWANTORO YAHMAN, M.Sc.):

Terima kasih.

Pimpinan dan kawan-kawan Anggota Komisi II serta,
Yang kami hormati Pak Menteri ATR BPN Pak Hadi dan jajarannya,

Ini lengkap sekali dan juga Pak Wamen, maaf itu kecil seperti saya jadi *enggak* kelihatan, nyempil gitu.

Ini pertama kita apresiasi Pak Menteri kinerja yang telah dilakukan sampai hari ini. Namun demikian kami juga ingin supaya persoalan-persoalan pertanahan ini bisa segera selesai yang sudah menumpuk, seperti tadi Pimpinan juga mengatakan RDPU-nya itu banyak sekali masukkan atau pengaduan masalah pertanahan.

Mungkin alangkah lebih baik bila Kementerian ATR BPN itu membuat *road map*. Sekali lagi saya inginkan supaya membuat *clustering* permasalahan, jadi supaya bisa selesai. Umpamanya konflik itu masalah pertanahan karena ini apa, muncul setelah pemerintah begitu aktif mengalakkan sertifikat tanah, baik dalam bentuk PTSL maupun yang lainnya, serta perkembangan ekonomi yang ada. Jadi, konflik itu muncul beberapa *cluster* yang perlu dikaji dan juga lebih baik juga dibuat semacam tim kerja di ATR BPN konflik persoalan pertanahan. Kalau yang lainnya apa, tadi Tora dan sebagainya, apa namanya? Saya pikir itu sambil jalan karena itu tidak ada permasalahan yang serius. Yang lebih serius adalah yang tidak bisa menunggu adalah konflik pertanahan antara rakyat. Ini ada beberapa, misalnya dengan masalah dengan Pemda, lahan

Pemda, terus ada dengan BUMN tadi dikatakan, BUMN apa, baik itu bentuknya dari PT Kereta Api atau apa HGU-nya punya BUMN semacam PTPN dan sebagainya dan juga konflik tanah antara rakyat dengan swasta, swasta bisa HGU perkebunan punya swasta dan sebagainya.

Yang berikutnya juga kaitannya ini rentetannya ini ada kaitannya dengan yang tidak kalah penting kaitannya dengan konflik dengan lahan transmigrasi. Lahan transmigrasi kami mendapat apa pengaduan banyak, baik dari Jambi maupun dari apa di Riau, di Bengkalis banyak, di Rokan hilir itu. Itu mereka yang di apa namanya, ditransmigrasikan oleh pemerintah dan mempunyai hak yang betul-betul *legal* dalam bentuk sertifikat ternyata itu diusir juga kaitannya karena itu masuk HGU. *Nah* ini harus diselesaikan ini, karena ini marwah dari pemerintah karena mereka juga pegang sertifikat yang berlambang burung garuda.

Selain itu juga Pak Menteri dan jajarannya. Ini ada beberapa kaitannya contoh umpamanya. Tanah dengan Pemda, saya menanggapi periode yang lalu umpamanya Provinsi Lampung, aset yang diklaim milik pemerintah Provinsi Lampung.

Ini sudah tahap penyelesaian waktu itu di Kemendagri, saya ulangi lagi di Kemendagri dan juga dari BPN juga datang, yang intinya itu *status quo*. Karena memang ada secara historis ada bukti otentik bahwa itu tanah dihibahkan oleh Dirjen Agraria waktu itu ke masyarakat tetapi diambil oleh Pemda Prov.

Nah, ini dari kesimpulan rapat itu juga sudah dikatakan bahwa ini dari BPN sendiri sudah mengatakan ini cacat administrasi dan ini memang harus ditarik. Hanya persoalannya waktu itu, itu bagaimana menariknya, ini problem-problem apa yang sudah sertifikat, itu ditarik haknya itu kan harus melalui peradilan itu lama dan itu juga, ini juga sampai sekarang malah ribut lagi.

Nah, terakhir ini juga kebetulan ada Kanwil Provinsi Lampung itu, itu, ini malah sudah mulai menjual. Gubernur Pemprov itu menjual walaupun katanya itu apa namanya, pemerintah menjual ke rakyat. Walaupun katanya, kalau diplesetkan itu katanya hibah, hibah kok nilainya tinggi sekali, padahal NJOP-nya berapa, inikan jual beli. *Nah*, celakanya lagi akta jual belinya itu beberapa kavling sudah dilepas itu di Kantor Kanwil BPN. *Nah*, ini apa BPN tidak mempelajari sejarahnya. *Nah* ini saya kritik keras Kanwil BPN Provinsi Lampung, harus hati-hati, harus hati-hati.

Saya tahu beliau itu kan belum lama di situ, tetapi harusnya peralihan tugas ini juga mempelajari dokumen sejarah apa namanya, konflik-konflik tanah yang ada supaya tidak, supaya tidak kejeblus hal-hal yang tidak diinginkan. Ini masih *status quo*, ada dokumen kesimpulan rapat yang mengatakan begitu. Saya membela keras karena memang waktu itu sudah ada kesepakatan itu, *nah* ini harus diselesaikan secara baik-baik.

Berikutnya, Pak Menteri kaitannya dengan mungkin dengan Pak Juyus ya, kaitannya dengan ini masalah tinggalan kasus lama masalah ganti rugi jalan tol, di Lampung Selatan tepatnya di pintu tol Kaliandra. Mudah-mudahan Kanta Lampung Selatan ada, ada *enggak*? Kalau ada coba angkat tangan.

Ini kaitannya begini Pak Juyus, ini kaitannya dengan notaris ini. Jadi, ini tanah mau kena jalan tol waktu itu, dibelilah oleh perusahaan yang namanya Sanitarindo Tangsel Jaya ada di Tangerang, dia membeli melalui lewat, melalui notaris, notaris ini terjadi akta jual beli tetapi di kasih DP 10%, 20% tetapi sertifikatnya diambil, diambil, nanti pelunasannya dia bilang gitu. *Nah*, sampai sekarang itu baru sampai 30%, *nah* rakyat ini bingung mau ngadu ke siapa, *nah* ini yang ngambil notaris, notarisnya ini jelas di sini ada apa namanya siapa tadi? Rudi Hartono kalau *enggak* salah, Rudi Hartono, S.H. M.Kn notaris PPAT, ini ini seperti apa, rakyat itu bingung mau ngadu kesiapa? Ke BPN kemungkinan dibayar oleh apa namanya pembebasan jalan tol, jasa marga atau apa, mungkin sudah. Tetapi kenapa waktu akta jual beli dengan notaris ini diambil sertifikatnya sampai sekarang diminta kembali *enggak* bisa. *Nah* ini.

Berikutnya, kaitannya dengan apa, sertifikat aspal, banyak sekali, karena ini pensertifikatan tanah rakyat itu bersifat rakyat harus aktif kadang kala ini banyak sekali muncul sertifikat aspal. Pura-pura akta jual beli dan sebagainya yang palsu. *Nah* ini akhirnya mendapat sertifikat. Ini bukan kesalahan BPN, tetapi memang ada ketidakcermatan dan juga sistem yang ada itu membuat rakyat itu belum begitu paham, belum begitu sadar akan hak-haknya. *Nah*, ini terjadi di Bintaro, Bintaro gitu, jadi sebagian dijual ternyata setelah ini apa namanya bingung dia, dari BPN apa namanya Jakarta Selatan juga bilang bahwa ini palsu, terus dari Kepolisian lapor forensik juga mengatakan ini jual belinya palsu, tetapi mau apa lagi, ini regulasi mengatakan itu harus lewat peradilan. Terus rakyat ini nunggu sampai kapan kan?

Nah, saya minta juga dipikirkan Menteri ATR BPN supaya apa namanya melakukan terobosan, terobosan bagaimana ini jangan terlalu lama melalui peradilan yang kita tahu sendiri begitu apa, begitu tidak jelas di peradilan kita, akhirnya yang menunggu juga akan capek sendiri atau meninggal. Sama saja, di peradilan, baik ini disebut peradilan mafia pertanahan di peradilan juga bisa. Juga di pemilu sama saja, waktu itu juga sama. Artinya apa? Artinya bagaimana Kementerian ATR BPN itu mempunyai posisi yang strategis untuk, untuk apa namanya, memberi pencerahan kepada peradilan. Selama inikan hanya sekedar sebagai saksi ahli. Saksi ahli didengarkan syukur, kebanyakan *enggak* didengarkan. Tetapi mempunyai kunci bagaimana ini mempunyai hak karena memang keahliannya itu memainkan peran untuk mempengaruhi peradilan supaya adil dan beradab karena banyak yang tidak adil dan tidak beradab. *Nah*, ini, ini persoalan masalah tanah.

Dan juga kaitannya kembali, saya kembali ke Lampung, ini juga ada kasus dengan tadi PT Kereta Api BUMN dan sebagainya PT Kereta Api. Itu apa namanya Pak, aneh bin ajaib, di daerah di situ ada yang bersertifikat. Inikan menjadi masalah kawan-kawan lain di sekitar itu. Inikan kecerobohan-kecerobohan ini jangan sampai terulang, ini supaya apa? Ini kita apa namanya bertumpuk-tumpuk permasalahan, belum kaitannya dengan kawasan hutan.

Ini seperti Pak Cornelis katakan tadi ada yang namanya TGHK (Tata Guna Hutan Kesepakatan) yang sebenarnya rakyat tidak sepakat karena apa? Zaman orde baru itu ada tawaran Sonokelingisasi. Mereka akhirnya karena ada tawaran itu, rakyat banyak menanam tanaman apa Sonokeling, setelah itu dibikin Tata Guna Hutan Kesepakatan ditariklah garis hutan itu yang ada Sonokeling pada saat itu bersamaan dengan reboisasi. Inilah yang menjadi masalah, akhirnya tanah-tanah rakyat itu masuk kawasan kehutanan di Lampung. Ini apa contohnya, saya pernah menyelesaikan di Kabupaten Pringsewu, itu 117,7 hektar saya suruh minta planologi kehutanan ngukur ulang, ternyata di luar kawasan hutan itu 50 tahun baru selesai 2018 dulu. Hal-hal semacam ini perlu ada *good will* dari pemerintah baik Kementerian ATR BPN bersama dengan Kementerian Kehutanan.

Yang terakhir kami dalam kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada Pak Budi Situmorang yang dalam hal ini telah memberi jawaban begitu cepat, begitu akurat, begitu jelas bagaimana kami harus bertindak, kaitannya dengan sengketa lahan di Lampung Timur di *great giant pineapple* itu ya kaitannya rakyat dengan apa perusahaan. Petanya jelas dan saya harus bertindak seperti apa jelas. Hanya persoalannya inikan masyarakat waktu itu Pak Budi itu banyak terkecoh atau dimanipulasi oleh oknum seolah-olah mewakili rakyat menjual tanahnya, ini yang menjadi masalah, jadi masalah, mereka rakyat tidak mengakui tanahnya dijual oleh perusahaan tetapi sudah terlanjur dijual oleh oknum-oknum yang tidak tanggungjawab. Oknum itu oknum jelas itu aparat penegak hukum ada bukti-buktinya yang ada sampai sekarang itu masih berkelahi.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Terima kasih Pak, coba Pak lihat tunjukin dulu catatannya, bawa catatannya di mana tadi, *nah* itu dia. Sambil makan dicatat Pak.

KEMENTERIAN ATR BPN:

Belum dapat *notebook* dari kementerian.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Terima kasih Pak Endro.

Pak Rifqi.

F-PDIP (H.M. RIFQINIZAMI KARSAYUDA, S.H., M.H.):

Terima kasih Ketua.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Ketua dan Pimpinan serta,
Anggota Komisi II yang saya hormati,

Pak Menteri dan Pak Wakil Menteri dan,
Seluruh jajaran kementerian ATR BPN yang saya hormati,

Pertama Pak Menteri, Pak Wakil Menteri, Pak Sekjen tolong evaluasi perintah Bapak-bapak ini terkait dengan kewajiban untuk mengikuti zoom dalam rapat kerja dengan Komisi II. Setahu saya Satker di bawah kementerian ini di daerah jumlahnya itu 400 lebih tetapi yang ikut dari awal cuma kurang dari 150 terus sampai sekarang jadi tinggal 135 itupun plus dengan Anggota Komisi II.

Pak Menteri,

Tidak bermaksud memprovokasi, ini soal kewibawaan Pimpinan, kami ini bukan merasa diperlukan, tidak. Tetapi berbagai macam persoalan teknis yang di- *delivery* oleh Anggota Komisi II DPR RI itu amat mustahil dijawab hanya dari Jakarta, hanya oleh Pak Menteri, oleh Pak Wamen, oleh para Dirjen, karena beberapa *case* yang disebutkan tadi, misalnya Pak Rahmat Muhajirin itukan Pak, sudah bikin *power point* sebenarnya beliau tadi, dengan data-data yang bagus, Pak Endro juga. Itu tentu harusnya diselesaikan oleh institusi di bawah karena itulah tugas kita dalam bernegara, dalam berbirokrasi. Kalau semua diselesaikan oleh menteri, wakil menteri, para pejabat eselon I, ya kita tidak menjalankan fungsi manajemen dalam berbirokrasi.

Saya ingin katakan para Kakanwil dan para Kakanta, itu tidak menghormati kita semua Pak, saya tidak ingin memprovokasi Pak Menteri, ini termasuk memprovokasi Komisi II DPR RI juga.

Yang kedua, izinkan saya ingin menggunakan *zoom* ini Ketua, sedikit saja kurang dari 30 detik. Saya ingin berkomunikasi dengan Kanwil Kalimantan Barat kalau Plt-nya ada disini tadi Ibu ya? Ada Kanwil Kalimantan Barat, ada ikut gak selain Ibu? Coba dibuka dulu, mana dari Kanwil Kalbar mana? Ayo coba dijawab, ayo silakan, mana, mana Kalbar, ayo di-*unmute* dong, ayo Komisi jangan dibuat orang tidak bisa ngomong, mana?

KANTOR WILAYAH KALIMANTAN BARAT:

Saya dari Kalbar.

F-PDIP (H.M. RIFQINIZAMI KARSAYUDA, S.H., M.H.):

Di-*unmute* dong, dari komisi mana? Mana Kalbar? Coba ngomong.

Nah ini Ibu Plt ikut tetapi *enggak* ada orangnya. Sekarang Ibu jawab pertanyaan saya, berapa jumlah honorer dari seluruh Kakanta, dari Kanta dan Kanwil di Kalbar, pertanyaan ayah saya itu Pak Cornelis. Jawab langsung saja Ibu, jumlahnya saja.

PLT KANTOR WILAYAH KALIMANTAN BARAT:

Siap Bapak ada 416.

F-PDIP (H.M. RIFQINIZAMI KARSAYUDA, S.H., M.H.):

416 Pak Yanda, sudah dicari tadi Pak Yanda, terima kasih Ibu Plt.

Selanjutnya yang kedua.

Pak Wakil Menteri,

Saya ini *follower* IG Bapak. Bapak keliling ke sana kemari membagikan sertifikat kepada Masjid, Gereja, Pondok Pesantren dan yang lain-lain. Sementara seingat kami DIPA-nya belum kami bahas di Komisi II DPR RI. Saya mau tanya itu pakai DIPA mana? Bapak keliling-keliling kasih aset itu, sertifikat-sertifikat, karena kita menyambut baik program ini, kita menyambut baik program ini. *Nah*, tolong ini didetailkan, di bantu Pak Sekjen dan ini menurut saya harus dilanjutkan tahun 2023, tahun 2024 karena kita banyak sekali rumah-rumah ibadah kita, masjid, gereja, pura, wihara dan seterusnya itu karena kita anggap rumah ibadah kita kerap kali abai terhadap legalitas atas lahannya.

Di beberapa tempat Pak Menteri, kita ini gelisah melihat ada beberapa tanah wakaf yang dulu diberikan oleh ahli warisnya untuk membangun masjid misalnya atau pondok pesantren. Yang bersangkutan sudah meninggal, tinggal cucunya, tiba-tiba cucunya membawa ke pengadilan untuk kemudian ingin mengambil kembali tanah yang dianggap milik kakek buyutnya. Padahal dulu yang bersangkutan itu dulu alumni dari madrasah atau sekolah itu. Ini tidak terjadi di kampung orang, ini terjadi di kampung saya. Bagi saya yang begini ini harus kita proteksi Pak, karena ini sangat sensitif, ini bukan urusan pengelola rumah ibadah dengan si pemberi wakaf bukan. Ini sudah urusan masyarakat setempat dengan si pemberi wakaf. Ini akan memicu konflik yang tidak berkesudahan.

Yang ketiga, apa yang disampaikan oleh para senior saya di Komisi II DPR RI ini semakin menguatkan kita untuk segera menyusun dan membahas RUU Pertanahan Pak. Karena ambil contoh tadi apa yang disampaikan oleh Ketua Saya Pak Junimart Girsang, terkait dengan banyaknya fenomena penguasaan lahan di luar HGU yang, yang kita tidak mampu melakukan langkah yustisial terhadap mereka kendati kita tahu karena ini harus di-*delivery* kepada aparat penegak hukum. Kementerian ATR BPN memberikan HGU 1.000 yang dia tanam 1.500, 500-nya masyarakat tahu itu di luar HGU, kita suruh ukurpun tahu kita. Tetapi kita tidak punya kewenangan untuk kemudian melakukan dalam tanda kutip proses yustisi atas 500 itu.

Nah, karena itu RUU Pertanahan itu menurut pandangan saya mendesak untuk segera kita lakukan usulan pembahasan dan seterusnya. Agar ada fungsi lidik dan sidik yang diberikan kepada Kementerian ATR BPN.

Termasuk saya dengan segala hormat sepakat dengan adanya ide tentang peradilan khusus pertanahan kendati itu pernah ditolak misalnya. Karena persoalan-persoalan ini dari sisi konstitusi sebetulnya kan memungkinkan kita melahirkan Badan Peradilan Khusus. Karena dalam ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kita memiliki 2 unit kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung beserta lembaga peradilan dibawahnya termasuk peradilan-peradilan khusus dan Mahkamah Konstitusi.

Yang terakhir, saya senang karena Kementerian ATR BPN sudah mulai membuka kolaborasi dengan berbagai kementerian lembaga termasuk pemerintah daerah. Tadi ada cerita *success story* di daerah asal saya di Kalimantan Selatan, bagaimana kolaborasi Kementerian ATR BPN dengan Pengadilan Negeri PL Hari misalnya dan pemerintah kabupaten Tanah Laut. Di mana pemerintah kabupaten Tanah Laut menganggarkan APBD untuk menyelesaikan *case-case* tanah yang sertifikatnya itu ada tetapi telah beralih melalui jual beli tentu di bawah tangan dari pihak asal transmigran ke pihak lain. Yang pihak asal transmigrannya sudah pulang mungkin ke asal tempatnya bisa jadi sudah meninggal dan seterusnya. Sehingga kemudian sertifikat ini tidak bisa dibalik namakan. *Nah* proses peradilan kemudian memberikan contoh kepada kita memungkinkan untuk itu.

Bapak/Ibu sekalian,

Tahun ini ada 200 kalau tidak salah yang dibiayai perkara dan itu akan melahirkan SHM. Tadi Pak Menteri sudah laporkan sudah ada 80 yang sudah putus dan menjadi SHM. Tahun depan ada 1.000, tahun depannya lagi akan dianggarkan 2.000, ini satu contoh baru di satu kabupaten. Yang diindikasikan ada 20.000 lebih masalah ini. Dari mana indikasi itu, itu ketahuan dari data Kantah setempat. Sehingga kalau kita *capture* Indonesia ini berarti jumlahnya besar sekali, *nah* kalau kita andalkan anggaran dari kementerian tentu terbatas, kolaborasi menjadi kata kunci.

Kolaborasi terakhir Pak Menteri, perlu juga saya sampaikan itu bisa dilakukan juga untuk mempercepat pensertifikatan tanah yang pembiayaan ukur tanahnya sudah dilakukan APBN atau melalui misalnya mohon maaf *loan* dari misalnya World Bank.

Di Kalimantan Selatan itu tahun lalu kami mendapatkan *loan* dari World Bank untuk 300.000 bidang tanah kalau tidak salah. Tentu ini menyisakan PR karena yang diukur sudah banyak sertifikatnya belum bisa keluar karena anggaran kita terbatas.

Nah, pemerintah daerah itu di beberapa kabupaten menganggarkan APBD untuk menyelesaikan ini, angkanya *enggak* besar setahu saya hanya sekitar kurang Rp200.000,00 per sertifikat. Sehingga kemudian kalau dianggarkan sekitar Rp2 miliar, Rp3 miliar, Rp4 miliar ini sudah akan menghasilkan 20.000 sampai dengan 40.000, *eh* 20.000 sampai dengan 30.000 sertifikat yang bisa kita kejar setiap tahun.

Bagi saya ini penting kolaborasi itu, karena itu kalau Bapak membuat MoU dengan berbagai kementerian lembaga, beberapa case positif di Indonesia ini menurut saya harus dijadikan *pilot project* untuk kita tarik menjadi program prioritas nasional agar kita betul-betul bergotong royong menyelesaikan persoalan keagrariaan di tanah air.

Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan.

*Wabilahitaufik wal hidayah,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Salam sejahtera untuk kita semua.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Wa'alaikumsalam warahmatullah,

Terima kasih Pak Rifqi.

Pak Ongku.

F-PD (DR. IR. ONGKU P. HASIBUAN, M.M.):

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Yang terhormat Pimpinan,
Kawan-kawan Komisi II,
Bapak Menteri,
Wakil Menteri,
Pak Sekjen, Irjen, para Dirjen dan seluruh jajaran,

Menyambung kawan-kawan yang sebelumnya saya ingin menyoroti mengenai yang pertama adalah mengenai serapan anggaran, yang saat ini atau serapan, iya anggaran dan juga realisasi daripada program ya, yang sangat timpang dan sangat rendah sebetulnya.

Saya lihat di sini bahwa misalnya untuk capaian program transmigrasi itu hanya 21% sebagaimana sudah disampaikan tadi. Sementara pendaftaran PTSL itu sampai 170% dan seterusnya. Saya lihat di sini ada ketimpangan yang luar biasa, saya ingin menyoroti apakah ini memang karena perencanaannya yang terburu-buru tadinya atau pada tahapan pelaksanaan ini untuk sektor-sektor tertentu itu dibuat sedemikian diuber begitu ya, sementara yang lainnya ditinggalkan begitu. Ini saya ingin menyoroti ini dan minta tolong agar nanti diperhatikan ini.

Yang kedua, saya ingin menyoroti mengenai redistribusi lahan eks HGU ya, eks HGU ini dilaporkan di sini ada 1.853 bidang atau 1.853.000 bidang untuk luasan 1.186.855 hektar ya. Apakah kita bisa mendapatkan detail

daripada redistribusi ini, apakah misalnya per-provinsi atau per apa namanya kategori masyarakatnya dan sebagainya? Jangan sampai nanti redistribusi ini banyaknya itu kepada misalnya ini kepada para pengusaha yang terlanjur mengambil tanah dan sebagainya sehingga di redistribusi ke mereka atau bagaimana gitu. *Nah*, ini kita pengen tahu detailnya seperti apa.

Kemudian demikian juga pelepasan kawasan hutan yang sekarang capaiannya hanya 8,13%. *Nah*, ini waktu membuat perencanaan, apakah Bapak-bapak sudah punya semacam *Road Map* lah kira-kira seperti apa yang mau dicapai ya dari target yang, target tadi pelepasan kawasan itu yang targetnya 4,1 juta hektar, kenyataannya sekarang hanya tercapai 333.000 hektar. Apakah sebelumnya ini ada *road map*-nya sehingga penetapan angka 4,1 itu tentunya harus ada dasarnya, kalau sampai dasar yang ada itu ternyata itu tidak bisa dicapai kenapa?

Nah ini kita kepengen tahu juga ini sebetulnya, detailnya apa ini persoalannya ya? Karena barangkali banyak juga orang-orang yang masih tetap mempertahankan kawasan itu *dikangkangi* sama mereka tetapi itu misalnya HTI yang tidak *perform* sebetulnya ya, tetapi tetap dikangkangi begitu ya, demikian juga yang lain-lainnya. *Nah*, kita pengen ini juga datanya dan juga bagaimana *Road Map*-nya ke depan, seperti apa yang akan kita lakukan.

Kemudian mengenai kawasan hutan ini juga. Ini saya juga pengen agar Pak Menteri dan kawan-kawan semua agar lebih fokus. Karena saya tahu bahwa banyak sekali pemukiman yang berada di kawasan hutan, menurut saya ini yang seharusnya diupayakan pelepasannya terlebih dahulu.

Tadi pagi kita ngobrol sama Menteri Dalam Negeri ini juga ada kasus ya, misalnya di Lampung, di situ banyak masyarakat tinggal di kawasan hutan. Mereka sudah mukim di sana bertahun-tahun, bahkan banyak yang dikasih sertifikat tetapi tetap itu masih kawasan hutan. *Nah*, ini bagaimana koordinasi antara Menteri ATR dengan BPN ini dengan KLHK.

Nah, sebaliknya misalnya ini bukan di kasus di tempat lain tetapi di kampung saya sendiri di Padang Lawas. Itu satu desa bahkan satu kecamatan itu hampir semuanya itu kawasan hutan, termasuk kantor camatnya, kantor koramilnya, kantor polres, kapolsek dan seterusnya dan seterusnya. *Nah*, ini bagaimana, padahal itu eksisnya sudah ya, namanya Ibukota Kecamatan saya itu namanya Binangga. Apakah kantor Camat Binangga itu kenapa kok bisa jadi kawasan hutan, masa *enggak* bisa beres ini sudah puluhan tahun, kantor camat itu saja sudah puluhan tahun ada disitu begitu loh. *Nah*, ini maksud saya agar yang namanya pelepasan kawasan hutan ini, coba difokuskan, difokuskan kepada lahan-lahan yang telah menjadi pemukiman masyarakat ya.

Saya kasih contoh ini di kampung saya itu, itu sama sekali tidak ada tanah yang bisa disertifikatkan, kenapa? Karena disebutkan kawasan hutan. Padahal itu sudah persawahan dari nenek moyang saya, kakek nenek saya itu sudah mewariskan itu semua. Tetapi begitu kita ada program waktu itu adalah program pensertifikatan tidak bisa karena kawasan hutan. *Nah*, ini saya kira, ini harus ada fokus ya, kawan-kawan dari ATR ini supaya fokus, mana

fokusnya. Jangan yang jelas HTI dan sebagainya, orangnya juga *enggak* ada tetapi di kasih sertifikat kepada yang lain, apalagi kebun sawit dan sebagainya.

Nah, ini mungkin prioritas kedualah menurut saya, prioritas pertama itu harusnya adalah kepada kawasan, supaya masyarakat itu punya hak atas tanah itu, sehingga bisa mereka memanfaatkan sertifikat itu untuk akses permodalan dan seterusnya dan seterusnya.

Terus kemudian ini aspek pengawasan ini Pak Menteri, barangkali ini ya Kanwil-kanwil juga. Saya pengen tahu juga ini ada Kanwil Sumatera Utara *enggak* disini ya? Pak Kanwil Sumatera Utara Pak Askani ya? Boleh kenalan sebentar Pak.

KANWIL SUMATERA UTARA:

Izin Bapak, sedang rapat dengan KPK Bapak.

F-PD (DR. IR. ONGKU P. HASIBUAN, M.M.):

Oh sedang rapat sama KPK, minta titip salam saja Pak sama Pak Askani ya.

KANWIL SUMATERA UTARA:

Siap Pak.

F-PD (DR. IR. ONGKU P. HASIBUAN, M.M.):

Saya Ongku Hasibuan dari Dapil Sumut II ya.

KANWIL SUMATERA UTARA:

Siap Pak. Izin hadir Pak.

F-PD (DR. IR. ONGKU P. HASIBUAN, M.M.):

Saya ingin tahu ini ya.

KAKANWIL SUMATERA UTARA:

Siap Pak.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Jadi itu diwakili Pak, Pak Ongku itu diwakili.

F-PD (DR. IR. ONGKU P. HASIBUAN, M.M.):

Siap, oh Pak Kabid mewakili beliau, oh terima kasih Pak Kabid.

Oke, jadi saya pengen tahu ini di Dapil saya ini Dapil Sumut II, kebetulan saya masih baru di Komisi II ya, ya berapa sih data PTSL yang ada di sana gitu, ya.

Kemudian program pertanahan di daerah saya ini, saya pengen tahu detailnya, bagaimana saya bisa berkoordinasi dengan anda, dengan Kanwil Sumatera Utara? Mungkin ke depan dan saya minta aspek pengawasan ini, kebetulan juga, ini kebetulan sekali Pak Menteri, menimpa saya pribadi. Ayah saya meninggal tahun 2002, eh 2011, ibu saya yang 2002 mohon maaf. Ayah saya meninggal 2011, iya dia membeli sebidang tanah tahun 1985 pakai sertifikat atas nama dia, oke. Kemudian setelah dia meninggal kami merubah sertifikat itu menjadi sertifikat waris dan sebagainya, tiga tahun sampai hari ini belum beres Pak.

....:

Di mana Pak?

F-PD (DR. IR. ONGKU P. HASIBUAN, M.M.):

Deli Serdang, minta tolong Kakanta Deli Serdang ini, tolong perhatikan ini, ini apa yang terjadi di tempat anda ini begitu loh? Ini apa mafia tanah sedang bermain gitu loh, tanahnya *enggak* banyak dan sementara saya mengurus tanah di Bekasi itu *enggak* sampai enam bulan selesai. Di Tapanuli Selatan *enggak* sampai enam bulan juga selesai, di Padang Lawas juga gitu tetapi kok di Deli Serdang ini sudah tiga tahun *enggak* selesai. Padahal itu cuma merubah dari ayah saya ke kami anak-anaknya begitu loh. Ini apa ini? Ini memang kasuistik barangkali tetapi ini perlu mendapat perhatian ya, pelayanan masyarakat ini bagaimana, sampai hari ini Pak, sudah lebih dari tiga tahun ini ya. Tanahnya di Deli Serdang Kecamatan Laut Dendang ya, oh gak hektar-hektar Pak, kecil Pak, namanya juga tanah orang tua seberapa sih tetapi persoalannya bukan di situ. Persoalannya adalah bagaimana melayani masyarakat ini, ada apa sih?

Saya minta tolong agar pengawasan agak sedikit diperketat terutama untuk daerah Sumatera Utara, mohon maaf ini Pak JG mungkin daerah kita ini paling banyak juga ini kasus ya. Termasuk PTPN III, termasuk yang lain-lain. Iya Pak Ketua Komisi juga Sumatera Utara, satu Dapil, cuma saya beda Dapil dengan Pak Ketua ini. Tetapi ya memang di sana itu banyak sekali permasalahan tanah itu, saya kira bukan di sana saja, di mana saja juga banyak ya.

Jadi, ya kembali lagi saya ingin pertegas lagi ya mengenai pelepasan kawasan hutan dan derestribusi lahan itu, saya ingin tahu komposisi penerimaannya itu seperti apa? Persile-nya itu misalnya masyarakat biasa persile-nya sekian untuk pengusaha sawit atau kebun sawit sekian dan sebagainya, jangan-jangan lebih banyak kepada pengusaha sawit ini larinya gitu. Ini yang saya, mudah-mudahan tidak ya, mudah-mudahan tidak.

Barangkali demikian Ketua, Pimpinan, terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Wa'alaikumsalam warahmatullahi.

Pak Difriadi.
Terima kasih Pak Ongku.

F-GERINDRA (DRS. DIFRIADI):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Yang kami hormati Ketua dan Pimpinan Komisi,
Yang kami hormati Pak Menteri dan seluruh jajaran,
Kawan-kawan Anggota DPR Komisi II,

Yang pertama, ini soal sengketa tanah yang barangkali penyelesaiannya menurut laporan Pak Menteri tadi sudah mencapai dari target ya 78%, saya kira ini cukup bagus dan perlu kita apresiasi. Tetapi barangkali banyak kasus atau *case-case* sengketa tanah lain yang belum masuk barangkali. Termasuk yang kemarin disampaikan oleh para pengadu ke Komisi ini yang telah disampaikan oleh Pak Pimpinan Komisi, Pak Syamsul. Saya kira kami ketika menerima pengadu itu banyak menangis, banyak prihatin, kenapa? Karena korban-korban mafia tanah ini dia sudah merasakan deritanya cukup banyak.

Nah, oleh karena itu kami berharap dan mendoakan Bapak Menteri selalu kuat dan sehat, kepada jajarannya juga begitu karena ini berat yang ditugaskan kepada Bapak ini. Karena saya tahu persis rumitnya persoalan tanah ini, tidak hanya menyangkut kewenangan BPN ATR, tetapi juga kewenangan instansi lain yang barangkali tidak nyambung, tidak sinkron tetapi *insyaallah* ikhtiar kita *insyaallah* tidak mengkhianati hasil. Oleh karena itu saya berdoa, Pak Menteri jajaran pertanahan, diberi kekuatan oleh Allah SWT untuk selalu berjuang untuk memperbaiki keadaan kita.

Selanjutnya ini persoalan yang disampaikan Pak Menteri tadi di lahan transmigrasi sertifikasinya lambat sekali ini perkembangannya, apa ini soal duitnya kurang atau ada soal lain?

Di lahan transmigrasi di kampung saya, di Kabupaten Kota Baru itu ada dua UPT bekas UPT ya, UPT unitlah karena ini transmigrasi. Itu mantan transmigrasi sampai saat ini belum keluar Pak sertifikatnya. Jadi saya merasa senang ketika Pak Endro tadi sertifikat dapat, Garuda dapat dari transmigrasi tetapi di dalam HGU. *Nah*, di tempat kami ini belum ngeliat gambar Garuda lagi para transmigran itu dan mohon saya kira ini daerah UPT Kumang dan UPT Pamukan Indah. Lahan transmigrasi yang barangkali kemarin telah

disampaikan oleh Kepala Dinas Transmigrasi Kota Baru ke Kepala BPN, mungkin sudah sampai ya ada suratnya.

Iya biarlah *enggak* apa-apa dikasihkan, saya kira begitu, karena kita jangan PHP Pak dengan transmigran ini, kita sudah programkan tetapi sertifikatnya *enggak clear clear*. Jangan sampai mereka kecewa kepada negara akhirnya kecewa kepada kita yang telah dipercaya mereka. Dan saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan keluhan mereka ini.

Yang terakhir Pak, terima kasih Pak, saya sebagai orang Kalimantan terima kasih kepada Menteri Pak Menteri dan jajarannya yang telah membuat rencana sudah detail untuk tata ruang Ibu Kota Negara, karena saya terus terang saja kalau bisa besok sudah pindah ini, kalau bisa, kenapa? Karena saya semangat sekali supaya saya *enggak* jauh-jauh dari kampung saya, karena *enggak* ada gempa, tadi pagikan gempa. Tetapi mudah-mudahan kita apresiasi Pak Menteri, langkah-langkah Pak Menteri dalam rangka menyusun rencana detail tata ruang Ibukota Negara dan semoga ini segera terwujud, saya sudah sangat ingin sekali Ibukota Negara ini pindah ke Kalimantan.

Terima kasih, itu saja Pak Menteri, mohon maaf, saya bangga, saya doakan, dan mudah-mudahan kita sama-sama Pak berjuang untuk memperbaiki keadaan.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Wa'alaikumsalam warahmatullahi.

Terima kasih Pak Difriadi.

Ada lagi?

F-PD (REZKA OKTOBERIA):

Daftar Pimpinan.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Ibu Okta, Pak Agung, terakhir Pak Yanuar.

F-PKB (H. SUKAMTO, S.H.):

Virtual Ketua.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Iya Pak Kamto silakan, nanti dikasih Pak Kamto ya, ya Pak Kamto kira-kira kapan datang fisik Pak Kamto.

F-PKB (H. SUKAMTO, S.H.):

Siap besok minggu depan siap.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T./F-PG):

Oke siap, nanti ya Pak ya.

Silakan.

F-PD (REZKA OKTOBERIA):

Baik, terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang saya hormati Pimpinan Komisi II beserta,
Seluruh Bapak/Ibu Anggota Komisi II,
Yang saya hormati Bapak Menteri ATR/BPN beserta dengan seluruh jajaran,

Pak Menteri, pertama sekali saya apresiasi capaian kinerja Pak Menteri sejak Pak Menteri dilantik, bahkan saya juga monitor Instagramnya Pak Menteri, Pak Menteri bahkan sampai *door to door* juga menyerahkan PTSL. Saya apresiasi sekali turunnya Pak Menteri ini ke lapangan. Saya berharap Pak Menteri konsisten dan juga Pak Menteri bisa mempertahankan kinerja seperti ini dan kalau bisa kita tingkatkan, bukan hanya dari segi Pak Menterinya saja, tetapi seluruh jajaran dari kinerja staf, dari bawah Pak Menteri sampai Kakantah itu, itu bisa ditingkatkan kembali Pak Menteri. Jadi, sekali lagi saya apresiasi untuk Pak Menteri dan terkait kinerja untuk jajaran Pak Menteri, saya yakin Pak Menteri bisa untuk mengkoordinir itu semua.

Selanjutnya Pak Menteri, terkait tadi yang sudah Bapak paparkan, capaian, saya mendengarkan dengan seksama. Tahun 2021 kalau saya tidak salah data capaian Kementerian ATR BPN adalah 90,76% betul Pak Sekjen? Betul ya Pak?

Dan dari paparan tadi saya baca, saya lihat, saya dengar, kita ini sudah di akhir tahun, satu bulan lagi lebih kurang akan sampai di 1225 Desember, capaiannya masih 70 koma sekian. Saya khawatir ini ATR BPN serapannya tidak akan maksimal, pelaksanaan program terburu-buru dan akan berakibat nanti usulan anggaran Bapak di tahun depan sulit Pak. Apa kira-kira yang bisa Kementerian ATR berlakukan dengan jangka waktu yang singkat ini?

Kembali saya juga teruskan yang sudah disampaikan Pak Rifqi zoom ini Pak Menteri memang kita bahas waktu itu di konsinyering, konsinyering kenapa? Kita mau sinergi kita dengan Pak Menteri selaku mitra, permasalahan apa yang kita sampaikan di konsinyering kah ataupun di rapat kerja itu bisa semua jajaran Bapak ini dengar Pak dan mempermudah kinerja Bapak juga.

Dari tadi yang dipaparkan oleh Anggota Komisi II itu semua dari masyarakat, permasalahan yang ada di lapangan. Harusnya anggota Bapak ini, ini sekarang naik Pak, sudah 152 plus Anggota Komisi II, harusnya mereka juga daerah yang disebutkan dari tadi, dari Anggota DPR sampaikan mereka juga langsung mencatat, kalau perlu besok pagi mereka sudah *report* melalui Kanwilkah atau nanti melalui Dirjenjnya masing-masing terkait hal yang kami sampaikan, itu Pak usul kami.

Tetapi Pak saya lihat dari tadi ada contoh Jawa Tengah gambarnya saja, orangnya *nggak* nongol saya *enggak* tahu kemana. Ada lagi Mazwar BPN, *enggak* tahu siapa ini Pak. Jadi, kalau mereka di sini hanya pasang layar kosong mereka entah kemana, artinya juga tidak mengapresiasi dan tidak menghargai, menghormati kinerja kita yang disini lagi sibuk rapat. Ini Pak, ini catatan penting bagi Bapak, karena memang ini permintaan kami waktu itu Pak, supaya langsung besoknya mereka langsung menyampaikan, oh Pak Menteri ini pembahasan kemarin yang di bahas Komisi II terkait ini Pak. Pak Menteri juga sudah tidak terlalu sibuk tinggal Pak Menteri tanya saja, *nah* ini contohnya salah satu Pak Menteri.

Selanjutnya saya juga mau tanya Pak, ini *rate* RDTR kita juga rendah 41% redistribusi kita juga rendah 53% inikan program yang sangat penting untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi Pak. Bisa dengan cara membagikan lahan secara adil dan merata kepada warga.

Kami Komisi II saya pribadi dan Komisi II kami siap membantu ATR BPN Pak untuk semua program ATR BPN ini bisa berjalan dengan baik. Apalagi program-program Bapak yang langsung kepada rakyat dan memang yang dibutuhkan oleh masyarakat, kami siap.

Nah, ini yang harus menjadi catatan Pak Menteri, waktu kita *enggak* lama, kalau ada kendala kami inikan mitra Pak, bisa kita bahas bersama, apa kira-kira yang bisa kita sinergikan? Apa yang bisa kami bantu? Kita mitra Pak, supaya ini semua bisa terlaksana dan capaiannya kepada masyarakat juga tercapai Pak setiap tahunnya termasuk serapan tadi.

Nah berikut Pak Menteri, transformasi digital saya cuma mau *reminder* sama Pak Menteri karena ini juga terkait dengan sertifikat elektronik dan segala macam tolong sosialisasinya Pak, supaya masyarakat kita tidak salah penerimaan. Disampaikan terus ke masyarakat terkait dengan transformasi digital kita ini. Waspada pemalsuan karena ini sangat rawan terhadap penduplikatan, sistem *security*-nya Bapak siapa yang akan pegang Pak? Harus orang-orang yang integritasnya tinggi Pak. Kalau *enggak* dia sendiri juga bisa cetak nanti Pak. Saya mengingatkan di sini. Karena ini perlu Bapak siapkan matang dan betul-betul kita bahas, kita harus bahas terkait ini.

Nah, di Rakernas Bapak kalau saya tidak salah, ada tiga arahan dari Pak Presiden Jokowi. Satu percepatan pendaftaran tanah melalui PTSL. Yang kedua penyelesaian sengketa terkait juga, terkait dengan masalah tanah dan termasuk mafia tanah. Yang ketiga IKN, RDTR dan pengadaan tanah.

Kami di sini sangat atensi Pak, terutama saya secara pribadi, point dua tadi mafia tanah. Saya pada prinsipnya akan selalu kawal ini Pak, kegiatan-kegiatan yang sifatnya membawa kesejahteraan dan kemudahan bagi masyarakat. Saya minta Bapak tidak main-main menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan mafia tanah. Kasihan Pak rakyat kita Pak. Berdarah-darah bahkan sampai kehilangan haknya akan haknya untuk tanah.

Nah, sekali lagi saya meminta Pak Menteri di sini, saya yakin Pak Menteri bisa, jangan ada yang main-main dengan urusan tanah, baik siapapun itu maupun oknum ataupun pihak ketiga.

Berikut Pak Menteri, tadi Pimpinan kami Pak Syamsurizal menyerahkan ke Bapak Sekjen. Itu adalah aspirasi langsung yang diterima di ruangan ini Pak Menteri. Sangat banyak mereka menyampaikan kepada kami aspirasi, bercucuran air mata mereka menyampaikan. Itulah yang mereka alami, membawa berkas, membawa data.

Saya minta yang diserahkan tadi oleh Pimpinan kami bukan masuk peti es, tetapi Bapak selesaikan dengan seluruh jajaran Bapak dan ditindaklanjuti. Jangan cuma kita terima formalitas hari ini selesai, besok kita lupa Pak. Itulah saya minta tadi zoom tadi Pak hadir. Supaya mereka juga paham dan mendengarkan. Sehingga apapun terkait hal yang akan dibahas di Komisi II, Pimpinan tertingginya ATR BPN ada disini ya mereka saksikan dan dengarkan, itu harus sebenarnya Pak.

Dan termasuk hal-hal dulu sebelum Bapak Menteri mungkin, sudah banyak juga yang kami sampaikan Pak. Saya *enggak* tahu bagaimana didalam internal Bapak merekap ini semua. Permasalahan yang masuk ke kami. Karena apa Pak, begitu sudah selesai ini Rapat Kerja dengan Bapak, kami-kami ini ditanya kembali sama masyarakat itu, bagaimana tindaklanjutnya? Kami ini wakil rakyat Pak, yang harus menyampaikan apa yang disampaikan oleh masyarakat. Menyampaikan mereka keluhan yang mereka sampaikan kepada kami, harus kami sampaikan kembali kepada pihak terkait, saya minta ini ditindaklanjuti.

Berikut terakhir saya minta Jawa Timur, Kanwil Jawa Timur, minta di-*unmute* operator, Kanwil Jawa Timur.

KAKANWIL JAWA TIMUR:

Siap Kanwil Jawa Timur, Ibu.

F-PD (REZKA OKTOBERIA):

Baik, terima kasih Pak Kakannwil dan Kakantahnya hadir Bapak? Gresik.

KAKANWIL JAWA TIMUR:

Kakantahnya tidak hadir Ibu.

KAKANTAH GRESIK:

Ada Pak Gresik Pak.

F-PD (REZKA OKTOBERIA):

Baik, terima kasih, catatan untuk Bapak Kakanwil.

KAKANTAH GRESIK:

Kakantah Gresik ada Ibu.

F-PD (REZKA OKTOBERIA):

Baik.

Pak Menteri,

Saya minta Bapak Menteri atensi terkait dengan kawasan ekonomi khusus JIP Gresik. Saya minta sekali lagi Pak Menteri atensi permasalahan di kawasan ekonomi khusus di JIP Gresik.

Ini proyek strategis nasional Pak, saya tidak mau jangan sampai investasi atau investor yang mau masuk ini batal gara-gara sengketa tanah. Jadi saya minta atensinya dari Pak Menteri.

Sekali lagi saya mengapresiasi Pak Menteri secara personal dan semoga ini kinerja Pak Menteri tetap bisa dipertahankan, ditingkatkan. Permasalahan tanah memang Pak tidak akan ada habisnya, tetapi ini akan bertambah terus kalau kita juga tidak berinisiatif untuk menyelesaikan satu per satu Pak.

Saya berharap yang hari ini kita bahas jangan hanya sampai formalitasnya hari ini tetapi Pak Menteri besok pagi sudah bisa meng-*action* dengan jajaran Pak Menteri.

Sekali lagi terima kasih mohon maaf apabila ada kata yang salah.

*Wabilahitaufik wal hidayah,
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Wa'alaikumsalam warahmatullah.

Ini memang kalau masalah tanah itu panjang urusannya. Yang tadinya mau sebentar jadi lama. Ini sudah setengah enam, masih ada Pak Agung sama Pak Yanuar, belum Pak Sukamto, Pak Sukamto ini biasanya walaupun virtual lama ini biasanya. Iya oke, karena habis ini kita mau rapat lagi dengan Menpan RB ya. Kita selesaikan dulu nanti apakah.

F-PKB (H. SUKAMTO, S.H.):

Nanti sedikit, Sukamto ngomongnya sedikit Ketua.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Di Raker berikutnya, saya lagi cari waktu.

Silakan Pak Agung.

F-PG (AGUNG WIDYANTORO, SH, M.Si.):

Baik Pimpinan.

Kalau tadi teman-teman sudah kenceng, saya *slow down* saja.

Yang pertama mengapresiasi, terima kasih Pak Menteri pakai batik bukan soal warnanya, meskipun ini tahun politik. Saya paling suka kalau ada orang pakai batik, rasanya nyaman dan aman Pemilu 2024. *Insy Allah* batik itu Bapak Agung tetap idola konstituen begitulah. Baik, bukan warnanya tetapi karena akronominya Bapak Agung tetap idola konstituen, jadi *Insy Allah* jadi lagi bersama-sama dengan Pak Menteri besok.

Pak Menteri dan jajaran,

Saya senafas dengan Ibu Reza tadi meskipun Ibu Reza kenceng, saya pelan saja, karena saya lebih suka pelan barangkali karena usia.

Memang benar capaian-capaian kinerja dan serapan yang di dalam *injure time* ini triwulan keempat ini masih belum tuntas, belum maksimal. Tolong harapan saya untuk bisa terserap dengan baik dan punya manfaat yang bisa dirasakan oleh warga masyarakat. Tadi ada yang minta Mas Menteri itu yang sertifikat dibagi, itu ada di tahun anggaran berapa begitu. Kalau saya tidak akan menanyakan itu tetapi kalau misalkan mau bagi bareng-bareng boleh datang ke Dapil saya begitu, kita bagi bareng-bareng.

Lalu yang kedua, ini ada aspirasi dari warga yang ada di Desa Mojodoyong Kecamatan Kedawung Sragen. Mudah-mudahan Kantah Sragen dan Kanwil BPN Jateng masih ada di layar monitor. Saya tidak berani panggil karena besok juga saya akan ketemu di apa, kunjungan kerja ke Jawa Tengah.

Yang bersangkutan *simple* saja, ini ada perkara yang sudah putus MK, eh *sorry* MA, tetapi pada saat eksekusi pada perkara tersebut nyerepet ke persil yang lain. Lah yang bersangkutan akan mengajukan apa gugatan atau permohonan ke MK, ke MA untuk bisa ada kejelasan tidak ikut serta dieksekusi begitu. Tetapi yang bersangkutan minta dibuka akses, ingin melihat buku tanah yang ada karena *enggak* mungkin kita gugat ke Badan Peradilan tanpa ada data otentik begitulah. Tolong melalui Pak Menteri nanti Kanwil Jateng dan juga Sragen, besok izin tolong dibukakan akses untuk setidaknya memberikan jaminan bahwa masyarakat berhak untuk tahu, *the right to know* begitu ya hak-hak keterbukaan informasi publik.

Kemudian yang terakhir saya kemarin buka medsos. Kami punya Panja Mafia Tanah, di Komisi III juga ada Panja Mafia Tanah. Kami mohon Pak Menteri bersama jajaran, tolong dibikin *clustering*, mana yang masuk *domain* Panja Mafia Tanah di Komisi III dan juga mana yang ada kaitannya dengan kita gitu. Mungkin apakah yang sudah jadi kasus, kemudian masuk Badan Peradilan *enggak* diputus-putus, barangkali itu masuk Komisi III. Tetapi kami juga punya kepentingan ada beberapa pencari keadilan yang mereka merasa tidak adil keputusan-keputusan itu. Demikian, sehingga nanti tidak tumpang tindih begitu.

Saya rasa demikian Pimpinan, saya tetap hormat dan mendukung apa yang menjadi target kinerja di 2022 ini, mudah-mudahan serapannya bagus dan manfaatnya bagi masyarakat juga bagus.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Wa'alaikumsalam warahmatullah,

Terima kasih Pak Agung.

Pak Sukamto nanti sama Pak Yanuar.

Pak Sukamto, Silakan Pak Sukamto.

F-PKB (H. SUKAMTO, S.H.):

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Wa'alaikumsalam warahmatullah.

F-PKB (H. SUKAMTO, S.H.):

Pak Menteri yang saya hormati,
Bapak/Ibu Anggota Komisi II yang terhormat,
Pak Menteri beserta seluruh jajarannya yang sangat saya hormati,

Kami dari Yogyakarta, sebelumnya kami akan menyampaikan untuk di Yogyakarta kelihatannya *gemah ripah loh jinawi*, tidak ada masalah tanah yang berarti. Sedangkan BPN Sleman kami kemarin mengunjungi kesana hari Jum'at itu lengkap, semua yang hadir disiapkan makan minum, mudah-mudahan seperti di kabupaten Sleman.

Pak Menteri,

Sedikit saja menyoroti yaitu tentang disampaikan Pak Menteri tentang capaian kinerja berupa laporan realisasi pelaksanaan anggaran dan fisik tahun 2002 tertanggal 15 November tahun 2002 dilaporkan 70,12%. Padahal kalau dihitung tinggal waktu beberapa bulan ini kita selesai tahun 2002 yang semestinya ini harus tahun saat itu harus sudah 87,5% tetapi ternyata baru 70,12% cara penyelesaiannya. Begitu juga kalau kami melihat laporan penarikan anggaran itu baru 59,6% ini cukup jauh. Kami minta penjelasan Pak Menteri.

Yang kedua, tadi dilaporkan oleh Pak Menteri tentang apa itu tentang, oleh Pak Menteri tentang dari Kementerian ATR BPN telah menanggapi 6 kasus pertanahan. Kasus apa saja 6 itu Pak kalau kita pengen tahu dan sejauhmana penyelesaiannya?

Yang kedua, apakah 6 kasus ini sudah menyelesaikan masalah ataukah 6 kasus ini hanya berapa persen dibandingkan kasus-kasus yang akan ditangani pada tahun 2002 ini?

Yang terakhir tentang pelaksanaan reforma agraria dilaporkan bahwa penataan aset pada tanah obyek reforma agraria atau disingkat TORA melalui legalisasi aset distribusi tanah yang ditargetkan sebesar 9 juta hektar, yang telah lebih lanjut yang sudah berada dan bersertifikat 3,9 juta hektar. Sebagian tanah transmigrasi seluas 0,6 juta hektar belum bersertifikat, mengapa bisa demikian Pak?

Orang-orang yang di transmigrasi itu orang susah, di daerahnya hidupnya susah, dia mempunyai harapan di daerah transmigrasi akan hidup lebih nyaman tetapi kenyataannya Pak tanah di sana ada percecokkan dengan masyarakat dan tidak turun sertifikat-sertifikatnya.

Nah, inilah akhirnya banyak transmigran itu pulang Pak, di saat kami berkunjung ke daerah transmigran, dia pada menangis pengen pulang. padahal dia mau pulang tidak punya biaya, masih ada beberapa yang tinggal di sana rata-rata bukan petani lagi, tetapi mereka adalah buruh bangunan atau tenaga buruh-buruh yang lain. Kami mohon perhatian Pak Menteri, apalagi Pak Menteri ini ... (suara tidak jelas) sangat kecil dibandingkan.

Demikian Pimpinan yang kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf.

*Wallahul Muwafiq Illa Aqwamith Thoriq,
Wassalamua'alikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Wa'alaikumsalam warahmatullah.

Terima kasih Pak Sukamto.

Pak Yanuar, terakhir.

WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI (H. YANUAR PRIHATIN, M.Si.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pimpinan dan Anggota Komisi II yang terhormat,
Pak Menteri dan segenap jajaran,

Terus terang Pak, ini saya senang sekali Pak bisa ketemu Pak Menteri pada sore ini, kenapa? Karena memang soal tanah ini a sampai z-nya panjang sekali hulu hilirnya luar biasa. Tetapi salah satu yang menarik itu begini, dalam keadaan tertentu atau di mana satu wilayah, satu lokasi, satu kawasan terjadi persoalan tanah, psikologi masyarakat berada pada kondisi satu tertekan, kedua mereka kehilangan harapan *hope* mereka atas tanah seakan jauh berkurang, optimisme mereka terhadap tanah itu juga jauh menurun. Sehingga jika di satu kawasan, di satu wilayah itu ada proyek pembangunan, apalagi kawasan strategis itu pasti kondisi psikologis masyarakat guncang.

Nah, pada saat semacam itu masyarakat hari ini itu kehilangan patron yang bisa dipercaya, Pak. Kehilangan *figure* yang mereka berharap bahwa itu adalah *super hero* dewa yang bisa membantu mereka. *Nah*, saya kira dalam konteks semacam ini, itu luar biasa sekali jika Pak Menteri mampu menempatkan posisi ini. Karena trauma di masa lalu setiap proses ini mesti korbannya adalah masyarakat luas, baik yang bersifat komunal adat maupun individu atau hak-hak yang bersifat pribadi.

Nah, pada saat Pak Menteri menjabat hari ini momentum semacam ini luar biasa banyak Pak. Momentum kawasan-kawasan strategis nasional yang meminta bahwa mereka berharap Pak Menteri mampu tampil sebagai *super hero* yang mampu membela mereka, saya ambil contoh Pak soalnya, ini saya ambil dua contoh saja Pak.

Yang pertama misalnya tanah IKN. Tanah IKN inikan perolehan hak atas tanahnya, perolehan tanah untuk IKN inikan juga informasi publiknya harus dibuka. Kita tahu misalnya pengadaan, perolehan tanah IKN inikan biasa melalui dua mekanisme. Pertama pelepasan kawasan hutan dan yang kedua pengadaan tanah, baik secara langsung atau melalui mekanisme pengadaan tanah untuk pembangunan.

Dengan dua mekanisme ini dengan luasan lahan IKN yang kita tahu sekitar 256.000 an 56.000 untuk kawasan pemerintahan, 200 untuk kawasan pengembangan dan seterusnya. Informasi soal ini seperti apa yang bisa diakses oleh publik? Jadi, misalnya pengadaan tanah, pengadaan tanah ini sudah tentu barang, sudah barang tentu akan berhubungan dengan pemilik lahan yang sudah ada disitu, apakah individu atau komunal atau adat dan seterusnya.

Nah, ini dalam proses ini kita tahu pengadaan tanah pilihannya kan sudah bisa kita tahu jual beli, hibah, rishlah atau misalnya melalui pelepasan sukarela. *Nah*, titik-titik penetapan lokasi inikan jika publik tidak tahu ini jadi masalah, kenapa? Karena dalam konteks ini juga kita harus mencegah terjadinya mafia tanah tentu Pak, itu satu. Yang kedua, psikologi masyarakat bahwa ketika ada soal ini mereka sudah siap-siap berada pada kondisi yang dirugikan. *Nah*, *hope* semacam ini saya kira harus mulai diapa? Dinetralsir, dibangkitkan oleh Pak Menteri bahwa IKN misalnya dengan pengadaan tanah yang dilakukan pemerintah, tidak akan membuat mereka jatuh miskin, itu satu. Taraf hidup mereka tidak akan kemudian anjlok itu dua. Yang ketiga masa depan merekapun tidak terancam karena ada IKN.

Jika misalnya ambil contoh, misalnya pengadaan lahan dengan proses jual beli harga tanahnya NJOP itu sudah pasti mereka dalam keadaan apa? *Down* taraf hidupnya karena ketika dengan harga NJOP mereka untuk membeli tanah lagi di tempat lain itu sudah pasti agak sulit, kenapa? Karena kawasan IKN berada pada posisi di mana harga tanah akan terus akan tumbuh dan berkembang. *Nah*, yang begini-begini ini, tentu menurut saya tidak boleh diabaikan karena ini menyangkut harkat dan martabat masyarakat kita di wilayah di mana sedang ada proyek-proyek penting dan strategis.

Apalagi misalnya jika informasi publik soal ini, masyarakat yang berhubungan langsung dengan itu menjadi tertutup informasinya, ini juga menjadi kurang bagus. Itu satu contoh saja Pak di apa, di IKN misalnya. Karena itu saya juga ingin sekali mendapatkan informasi soal yang semacam ini. Karena ini *live* ditonton oleh banyak publik, oleh banyak masyarakat bahwa pengadaan lahan di IKN itu *fine* saja, bakal menguntungkan masyarakat dan masyarakat tidak perlu gelisah dan seterusnya. Inikan *statement* inikan harus menjadi bagian penting dari komitmen pemerintah bahwa ini pembelaan

terhadap masyarakat. Meskipun mungkin jawaban bisa dilakukan berikutnya nanti secara tertulis atau bagaimana, karena waktunya terbatas.

Yang kedua, contoh lain misalnya Pak di kawasan Labuan Bajo, inikan juga proyek nasional, Pak Menteri mungkin harus mencek juga konflik tanahnya radiusnya sebesar apa, siapa yang berkonflik di sana? Sebab setiap ada kawasan strategis ini mesti ada problem pertanahan, karena kemarin seingat saya ada warga dari Labuan Bajo datang ke sini menyampaikan bahwa hidup mereka terancam oleh karena Badan Otorita Labuan Bajo dan Flores bermasalah dengan tanah mereka. *Nah*, inikan yang begini-begini jika apa, tidak ada pemihakkan dari kita yang punya kewenangan, kekuasaan, tentu harapan mereka menjadi kecil dan itu tanah-tanah mereka sedang terancam karena BPOP rupanya mengambil proses pembangunan di sana jalan segala macam itu komunikasi dengan warga kelihatannya buruk, sebab kalau komunikasinya bagus mereka *enggak* akan sampai di sini Pak.

Jadi kita rumusnya gampang jika warga datang sampai ke sini, padahal mereka datang sampai kesini itu ongkosnya luar biasa Pak dari NTT ke sini bahkan ada kemarin bilang hampir 40 juta betul ya Pak ya? Hanya untuk ke sini mereka siapkan keluar uang 40 juta padahal kita juga *enggak* tahu dari mana mereka dapat uang itu. Sehingga kita berasumsi bahwa ada masalah di sana, Badan Otorita Labuan Bajo dengan warga di Manggarai Barat, kalau *enggak* salah di Manggarai Barat kabupatennya, kecamatannya kecamatan Komodo Pak, Desa Gorontalo. Jadi mohon bisa dicek agar masyarakat disana lebih tenang dan mudah-mudahan ada *win win solution*.

Yang terakhir itu Pak harapan saya bahwa dengan kasus-kasus besar ini masyarakat mendapatkan rasa nyaman, rasa tenang, rasa *happy* tidak merasa terancam. Sebab kalau kondisinya begini itu bahaya juga. Nanti proyek-proyek nasional justru bukan menguntungkan warga tetapi justru malah mengancam kehidupan warga kita di hari esok dan ke depan.

Terima kasih Pak, saya rasa itu saja atas informasi yang Pak Menteri sampaikan, saya sampaikan terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Pak Yanuar. Ada lagi?

Bapak/Ibu sekalian,
Saudara Menteri,

Tadi sudah sama-sama kita dengarkan banyak sekali, banyak sekali pertanyaan, masukkan dan kemudian penyampaian aspirasi sebetulnya lebih banyak. Jadi seperti yang pernah saya katakan beberapa kali memang kalau masalah pertanahan ini, masyarakat itu selain juga ke kementerian tetapi juga

menyampaikan juga kepada Komisi II. Karena mereka berharap, menganggap dan berharap kami di Komisi II ini bisa membantu menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi. Jadi pasti terus akan terus bertambah, berkembang, bertambah.

Dan tadi saya juga mendengarkan beberapa dari Bapak-bapak dan Ibu-ibu memberikan terus *support* kepada saudara menteri dan kementerian ATR, untuk bisa menyelesaikan walaupun kita juga tahu beberapa bulan terakhir ini, saudara menteri sudah banyak sekali melakukan upaya-upaya terobosan tetapi memang masalah memang masih banyak begitu, *nah*.

Bapak/Ibu sekalian,

Kita punya *concern* waktu, ini sudah magrib. Setelah itu kita nanti juga akan apa namanya, akan rapat kerja dengan Menteri PAN RB. Sementara tadi masalah banyak sekali, saya mengusulkan ini kita skors.

ANGGOTA KOMISI II DPR RI:

Tertulis saja Ketua.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Jangan Bapak, tunggu dulu Pak, kalau tertulis sudah selesai masalahnya. Jadi kita skors kita cari waktu, kita sambung rapat kerja berikutnya ya, nanti diatur sama Sekretariat dan juga protokol di kementerian. Sambil nanti apa namanya, kementerian mencatat dan kemudian mencoba memilah-milah yang mana yang bisa dijawab dan didiskusikan, itu yang pertama kalau kita sepakati.

Nah, yang kedua saya pernah juga bicara sama termasuk sama Pak Wamen ini, sama beberapa Dirjen ini masalah ini pasti atau situasi ini akan terus berulang ya. *Nah* dan kalau kita mengharapkan menyelesaikan masalah dengan mekanisme yang seperti ini kan terbatas. Satu, Komisi II mitranya ada enam belas. *Enggak* mungkin setiap hari Raker dengan Kementerian ATR BPN dan saya kira kementerian juga tugasnya banyak, *enggak* kalau rapat-rapat saja *enggak* selesai masalah di lapangan kira-kira begitu.

Nah, oleh karena itu sebetulnya mungkin ya, mungkin kita perlu berpikir, dulu kita sudah pernah buat juga sebetulnya tim kerja tetapi fokus masalah tim kerja penyelesaian sengketa pertanahan ya, yang sampai sekarang tim itu belum dibubarkan tetapi kayaknya juga jalan di tempat juga.

Nah, saya tidak tahu dengan semangat baru yang dibawa, yang diusung oleh Pak Menteri ini apakah kita membuat semacam Satgas begitu ya. Buat Satgas yang kalau ada masalah-masalah seperti tadi yang dikemukakan itu bisa cepat. Bisa cepat sampai kepada Menteri, terus apa eksekusinya dan kami juga tahu apa tindaklanjutnya begitu, yang bisa 24 jam kita monitor dan ini mungkin Satgas ini ya di luar rapat kerja bisa kita evaluasi, ada pertemuan-pertemuan yang informal gitu.

Karena ini numpuknya kaya begini ini Pak ya, karena capek Pak, tiap hari dapat masukkan-masukkan ya begitu muncul sekali raker dimuntahin semua ini. Kira-kira begitu dan habis ini *enggak* tahu kalau kita *enggak* monitor, *enggak* tahu selesai atau *enggak* begitu dan nambah lagi masalah.

Jadi nanti maksudnya begini, ini saya sampaikan kudu nanti kita diskusikan di rapat kerja berikutnya juga. Salah satu mungkin tawaran kami menyelesaikan masalah ini dengan cara itu mungkin. Jadi *enggak* usah dijawab sekarang nanti kita diskusikan, intinya kita semua ingin menyelesaikan masalah ini ya dan masalah ini memang, masalah pertanahan ini ya tadi saya katakana, selama kita manusia ini tinggal di bumi, menginjakkan tanah, pasti masalah pertanahan *enggak*, ada saja bukan *enggak* selesai-selesai, pasti ada saja begitu.

Jadi, kita tidak usah, tidak usah *hard feeling* dan tidak usah merasa apa namanya, capek. Ya memang tugas kita, begitu kita diamanahi duduk di DPR, Komisi II, diamanahi jadi Menteri, Wakil Menteri dan Dirjen-Dirjen ya tugas kita menyelesaikan masalah itu, kira-kira begitu ya.

Kita bisa sepakati ya, kita tutup rapat ini, kita skors ya nanti kita cari waktu. *Nah*, sebelum kita tutup, kalau kita apa namanya, sebelum kita skors mungkin Pak Menteri ada yang mau disampaikan.

Silakan Pak.

MENTERI ATR BPN REPUBLIK INDONESIA (MARSEKAL TNI (PURN) DR. (HC) HADI TJAHJANTO, S.I.P):

Terima kasih Pimpinan.

Saya ingin menyampaikan terobosan, jadi setiap ada masalah itu langsung kita selesaikan. Akibat dari tangisan rakyat yang datang baik di Komisi II maupun di kementerian. Adalah permasalahan legislasi tanah masyarakat yang berada di wilayah aset milik negara, ini harus kita selesaikan dulu. Karena permasalahan ini hampir setiap hari nangis di tempat saya dan saya sudah membuat satu terobosan seperti di Blora.

Apabila di Blora itu berhasil maka permasalahan tanah di seluruh Indonesia selesai, contohnya Sobo Kerto, Blora, Suradijo, Pelindo, Lampung, warga waringin KAI, Gili Trawangan, Rumah Tubun ini dengan satu model dari Blora. Ini mudah-mudahan dari Jawa Tengah mendengarkan, minggu depan itu akan saya panggil hasil editingnya dari Kanwil Blora dengan Bupati Blora dan saya sudah kontak dengan Menteri Dalam Negeri, Dirjen itu kita akan bicara antar dua Dirjen dan kita akan bikin satu perjanjian kerjasama dua Menteri.

Karena permasalahan di lapangan begini Pimpinan. Mereka takut mengeksekusi karena takut dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 masalah Perbendaharaan Negara. Padahal sebetulnya perbendaharaan Negara itu tidak akan hilang kekayaannya apabila kita menggunakan skema

adalah HGB, hak pakai di atas HPL. Ini kalau sudah selesai dan semuanya akan kita eksekusi baik tanah hijau, surat hijau baik permasalahan-permasalahan yang ada di atas HPL, ini akan selesai. Dan saya yakin mungkin proses awal tahun kita akan sudah eksekusi, itu yang pertama Pimpinan, segera kami tindaklanjuti.

Kemudian yang kedua, masalah tanah transmigrasi, kami tidak tahu eksak *location*-nya yang dimiliki oleh Kementerian Desa dan Transmigrasi, apabila mereka memberikan ini loh tempatnya, ini permasalahannya atau kita akan melaksanakan *joint survey* kita akan selesaikan. Oleh sebab itu kita juga akan melaksanakan MoU dengan Kementerian Desa dan Transmigrasi, sehingga permasalahan ini akan selesai seperti yang dilakukan di Kalimantan Selatan, ini adalah salah satu contoh bagus, tanggal 5 saya akan ke sana.

Kemudian berikutnya kami laporkan bahwa ada 10,2 juta masyarakat ini hidup di kawasan hutan dan 6,7 itu tinggal di kawasan hutan, kurang lebih 28.834 desa definitif di kawasan hutan. Oleh sebab itu kami akan terus koordinasi, sebenarnya kami sudah koordinasi dengan KLHK tetapi masih yang kami laporkan tadi bahwa 9.000.000 tanah itu yang harus kita selesaikan 4.500.000 sudah selesai karena itu legislasi, legalisasi.

Kemudian yang distribusi, redis itu hanya sekian persen itu karena apa? Permasalahan ada di hutan dan yang baru diserahkan itu hanya 1,6 juta dari empat koma sekian, itupun baru sekian ratus yang baru selesaikan.

Kemudian PTPN tanggal 5 saya akan ke Lampung, sudah janji untuk melaksanakan pengukuran ulang. Dan terus terang selama saya jadi Menteri saya kunker paling banyak dari Sumatera Utara, empat kali itupun masih banyak di kepala saya yang harus saya kunjungi.

Termasuk saya akan melaksanakan audit terhadap HGU, karena HGU yang di Aceh itu bagus sekali, langsung bisa meredis sebagai plasma, langsung 2.000 hektar. Saya ingin manggil seluruh pemilik HGU apakah sudah melaksanakan kewajibannya, akan saya *random* dari Kalimantan Barat sudah ada target. Kemudian Jambi sudah ada target dan Riau sudah ada target.

Itu saya kira Pimpinan, yang lain akan kami jawab dengan tertulis dan sekali lagi mafia pertanahan percayakan bahwa saya akan komit dengan mafia tanah termasuk juga kawasan ekonomi khusus Gresik JIP, sudah saya panggil dua kali karena saya mengharapkan tidak terganggu dengan pengadaan tanah. 50.000 karyawan akan diserap di situ. Dan untuk Penlok juga kami bantu dengan Gubernur Jawa Timur, kemarin sudah kita bantu bagaimana jalannya, termasuk masalah reklamasi juga kami bantu.

Jadi, permasalahan-permasalahan untuk meningkatkan perkonomian rakyat saya komitmen untuk itu. Dan akan kita selesaikan permasalahan-permasalahan di lapangan yang penting ada terobosan dan *mletek* atau *netes* kalau tidak percuma kerja kita, seandainya saya diberi waktu sehari 36 jam saya akan habiskan untuk rakyat.

Demikian terima kasih.

*Wabilahitaufik wal hidayah,
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,

Terima kasih Saudara Menteri ATR BPN.

Bapak/Ibu sekalian,

Saya kira seperti yang tadi sudah kita usulkan. Kita sepakat ya bahwa rapat ini kita skors ya diskors pada rapat kerja berikutnya, nanti dari kementerian silakan persiapkan jawaban tertulisnya. Nanti kita akan lakukan pendalaman lagi di rapat kerja berikutnya. Termasuk nanti saya kira akan kita bahas solusinya untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah ini secara cepat itu kaya gimana. Kalau soal Sumatera Utara Bapak mahlumi saja dan memang harus sering-sering ke sana Pak.

F-PDIP (Ir. H. ENDRO SUSWANTORO YAHMAN, M.Sc.):

Pimpinan Interupsi.

Minta waktu setengah menit.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Silakan Pak Endro.

F-PDIP (Ir. H. ENDRO SUSWANTORO YAHMAN, M.Sc.):

Saya hanya pesen kepada Pak Menteri ATR BPN, jadi persoalan yang tadi dikemukakan itu bagus. Hanya saya titip itu kadangkala persoalan-persoalan sengketa tanah yang sudah terlanjur diklaim milik pemerintah atau negara kadang-kadang itu macetnya di Menteri Keuangan, atas dasar kehati-hatian. Padahal itu pengadilan sudah menetapkan bahwa itu milik rakyat. *Nah* tolong Pak Menteri ini berkomunikasi secara aktif dengan Menteri Keuangan supaya ini jangan menjadi hambatan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Iya, terima kasih Pak Endro. Baik.

Bapak/Ibu sekalian,

Dengan mengucapkan *Alhamdulillah* maka rapat ini kita skors sampai tanggal yang nanti kita akan sepakati bersama.

Terima kasih.

Selamat malam,
Salam sejahtera untuk kita semua,

*Wabilahitaufik wal hidayah,
Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.*

(RAPAT DITUTUP PUKUL 17.55 WIB)

**Jakarta, 21 November 2022
a.n. KETUA RAPAT
KABAG SET. KOMISI II,**

a.n. hā.

**Mahmud, S.E.
NIP. 196508021988031002**